

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
MAKASSAR TAHUN 2013**

**(Studi pada pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik pada  
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**LUKMAN JANJI**  
**NIM. 30600110024**

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, plagiat, tiruan, dan dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka predikat yang di peroleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 17 Maret 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**LUKMAN JANJI**  
Nim. 30600110024

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَ

نَبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas kehidupan penulis hingga pada akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan. Shalawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai junjungan muslim sedunia, serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama sekaligus sebagai Ideologi rasional.

Dengan memperhatikan bimbingan dan arahan dari pembimbing dalam proses bimbingan dan saran-saran dari para penguji dalam seminar proposal penelitian akhirnya Skripsi yang berjudul **“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi pada pelajar di tingkat sekolah menengah atas di Kota Makassar)”** dapat terselesaikan. Maka tanpa mengecilkan peran yang lain, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua orang tua terkasih Agus Paola serta Ibuku Kuasha, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya. Kepada saudara-saudara tercinta dan kepada keluarga dekatku yang terlibat (secara tidak langsung) dalam prosesi perjalanan dunia akademik penulis.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

4. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si dan Wahyuni, S.sos, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan (i) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan di bangku kuliah.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan doa, dorongan dan motivasi sehingga Skripsi ini terselesaikan sebaik-baiknya, tidak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
7. KPU Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bappeda Kota Makassar, yang telah memberikan data yang diperlukan selama proses penelitian.
8. SMA N 1 Makassar, SMK N 8 Makassar, MAN 2 Model Makassar yang telah mengizinkan dilaksanakannya penelitian di sekolah.
9. Tidak terkecuali seluruh informan beserta responden yang telah memberikan informasi demi kelengkapan data di lokasi penelitian.

Akhirnya, meskipun Skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologi, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Penulis mohon maaf atas judul yang berbunyi lebih bagus daripada isi. Demikian semoga apa yang ditulis dalam Skripsi ini diterima oleh Allah swt sebagai amal saleh.

Makassar, 17 Maret 2014

Penyusun,

**LUKMAN JANJI**  
**Nim: 30600110024**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	37
H. Sitematika Penulisan .....	45
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum Kota Makassar .....	47
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58

C. Profil Singkat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 ...	65
---	----

### **BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 .....	89
B. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 .....	109

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran-Saran .....	116

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	118
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	120
-----------------------	-----

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Daftar sekolah dan jumlah sampel	41
Tabel 2	Jumlah penduduk menurut kecamatan Kota Makassar tahun 2011	49
Tabel 3	Jumlah penduduk dirinci menurut rasio jenis kelamin Kota Makassar tahun 2011	51
Tabel 4	Persentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Makassar tahun 2011	52
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 di Kota Makassar	53
Tabel 6	Daftar pemilih tetap (DPT), pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013	87
Tabel 7	Pengetahuan pemilih pemula tentang pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota secara langsung	89
Tabel 8	Distribusi responden berdasarkan sumber informasi tentang pemilihan walikota dan wakil walikota	90
Tabel 9	Pengetahuan pemilih pemula tentang penggunaan hak suara dalam pilkada	91
Tabel 10	Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang terdaftarnya dalam pilwali	92
Tabel 11	Distribusi responden berdasarkan usaha mendaftarkan diri dalam calon pemilih sementara	93

Tabel 12	Sosialisasi KPU Kota Makassar kepada pemilih pemula di Kota Makassar	94
Tabel 13	Harapan pemilih pemula untuk dapat mengikuti sosialisasi KPU	94
Tabel 14	Pengetahuan pemilih pemula di Kota Makassar tentang calon walikota dan wakil walikota Makassar 2013	95
Tabel 15	Tingkat partisipasi pemilih pemula dalam kampanye calon walikota dan wakil walikota Makassar	96
Tabel 16	Distribusi responden berdasarkan alasan mengikuti kampanye pilwali Kota Makassar	96
Tabel 17	Distribusi responden berdasarkan alasan tidak mengikuti kampanye pilwali Makassar 2013	98
Tabel 18	Distribusi responden berdasarkan penilaian terhadap pencalonan diri walikota dan wakil walikota yang menjabat	99
Tabel 19	Sikap pemilih pemula terhadap calon yang dia kenal	99
Tabel 20	Alasan pemilih pemula memilih salah seorang calon yang sudah dia kenal pada pilwali Kota Makassar	100
Tabel 21	Alasan pemilih pemula untuk tidak memilih salah seorang calon yang sudah diakenal pada pilwali Kota Makassar	101
Tabel 22	Pandangan pemilih pemula terhadap golput	102
Tabel 23	Alasan pemilih pemula kenapa dia setuju dengan golput	103
Tabel 24	Alasan pemilih pemula kenapa dia tidak setuju dengan golput	103

Tabel 25	Sikap pemilih pemula yang akan menceritakan keburukan salah satu calon kepada orang lain jika dia mengetahuinya	106
Tabel 26	Partisipasi pemilih pemula untuk bersosialisasi kepada orang lain	106
Tabel 27	Bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemilih pemula	107



**Judul Skripsi : PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013 (Studi pada pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar)**

---

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Partisipasi politik merupakan kegiatan ikut serta dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan publik hingga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan. Pemilih pemula merupakan orang yang telah berumur 17 tahun dan terdaftar sebagai calon pemilih dalam pemilihan umum. Sedangkan pemilihan walikota dan wakil walikota adalah kegiatan untuk mengganti pemimpin atau memilih calon pemimpin dan wakilnya yang sesuai dengan keinginan rakyat lewat pemilihan umum di kota Makassar. Hal yang diteliti adalah bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dan faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Pemilih pemula dalam pemilu perlu diteliti karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai pemilu sementara jumlah pemilih pemula yang bertambah tiap tahunnya sehingga mengakibatkan tingginya tingkat golput dikalangan pemilih pemula.

Teori yang digunakan dalam memecahkan masalah yang diteliti yaitu teori partisipasi politik, teori pilihan rasional, dan teori kelas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed metode reseach, yaitu metode penelitian yang menghubungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif atau mengombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 7 informan pelajar untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Makassar. Kemudian dilakukan penyebaran angket dengan menggunakan responden 100 pelajar dari beberapa sekolah menengah atas (SMA) sebagai sampel dalam penelitian untuk mengetahui pengetahuan pemilih pemula mengenai pilwali Makassar, tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pilwali, dan faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum.

Hasil penelitian menggambarkan rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pilwali Makassar tahun 2013. Hal ini merupakan akibat dari rendahnya pengetahuan pemilih pemula mengenai pemilu. Partisipasi politik yang dipahami oleh pemilih pemula hanya sebatas pemberian suara dalam pemilu. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula adalah faktor keluarga, pengaruh teman sebaya, media massa, dan pengetahuan politik.

**Kata Kunci:** Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, dan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Partisipasi politik merupakan kegiatan ikut serta dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan publik hingga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan. Memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum di laksanakan, ikut serta dalam kegiatan kampanye dan mengadakan hubungan dengan pemerintah, pejabat, dan kegiatan lainnya merupakan kegiatan partisipasi.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden-Wakil Presiden.<sup>1</sup>

Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar adalah kegiatan untuk mengganti pemimpin atau memilih calon pemimpin dan wakilnya yang sesuai dengan keinginan rakyat lewat pemilihan umum di Kota Makassar. Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum menarik untuk diteliti dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. Alasan ini sangat rasional melihat usia pelajar sekolah

---

<sup>1</sup>Andi Faisal Bakti dkk.,eds. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Churia Press, 2012). Hal 127

menengah atas (SMA) pada saat ini berkisar 16-18 tahun dan sudah termasuk dalam pemilih pemula.

Tingkat partisipasi politik pemilih pemula perlu diketahui karena partisipasi pemilih pemula juga menentukan dalam pemilihan umum, tidak terkecuali dalam pemilihan walikota Makassar. Semua warga Indonesia berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum dengan catatan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Pada saat ini usia pelajar di sekolah menengah atas (SMA) berkisar antara 16-18 tahun dan sudah termasuk dalam pemilih pemula dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan pemerintah yang tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa warga negara yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak suara, dan untuk bisa menggunakan hak suara tersebut maka warga negara tersebut harus terdaftar sebagai pemilih seperti yang di tuliskan dalam pasal 16 ayat 1, dan pada ayat berikutnya dikatakan bahwa pemilih yang dimaksud pada ayat 1 diatas nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah berdomisili di daerah pemilihan tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pada ayat 3 pasal 16 dikatakan bahwa seorang Warga Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam

daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 maka tidak dapat menggunakan hak suaranya.<sup>2</sup>

Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi atau pemilihan umum sangat penting karena pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya. Hal yang ditakutkan pada saat diadakannya pemilihan umum adalah banyaknya masyarakat yang tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang disebut dengan golongan putih (*golput*) entah karena pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang partisipasi politik atau tidak adanya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Makassar untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Tidak adanya sosialisasi dapat menjadi masalah yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal tersebut dapat terjadi pada pemilih yang tergolong dalam pemilih pemula yang seharusnya turut berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut namun terkendala karena ketidaksadaran dan tidak mengetahui bahwa dia seharusnya sudah dapat menyumbangkan suara atau hak pilihnya dalam pemilu. Besar kemungkinan hal-hal tersebut dapat terjadi pada pemilih pemula yang baru pertama kali akan mengikuti pemilihan umum.

---

<sup>2</sup>Lihat Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sosialisasi politik sangat penting dilakukan di masa ketika anak telah bertumbuh menjadi remaja dan pemuda. Di masa-masa seperti ini kepercayaan-kepercayaan politik seseorang dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga, dan lingkungan. Mereka bisa mempengaruhi dukungan terhadap partai politik tertentu. Individu-individu memperoleh orientasi politik dasar pola perilaku politiknya melalui sosialisasi politik dalam rangka mengenal gejala sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seringkali dikemukakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi dalam sebuah masyarakat tergantung pada berhasil tidaknya sosialisasi politik yang dilakukan.

Meningkatkan partisipasi politik ditingkat pemilih pemula di Kota Makassar merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Selain KPU Kota Makassar, partai politik dan calon walikota dan wakil walikota memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk menambah dukungan dalam pemilihan umum dan memaksimalkan pelaksanaan pemilihan umum pada tingkat pemilih pemula di Kota Makassar.

Hal-hal yang menjadi kekhawatiran tersebut harus diantisipasi agar tidak ada oknum, pihak, atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. Tentunya hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi oleh KPU Kota Makassar agar terlaksana maksimalnya pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. Tidak ada salahnya

jika kita memperhatikan hingga ketinggian tersebut, karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang berhak memimpin Kota Makassar selanjutnya.

Partisipasi politik pemilih pemula sangat menentukan kemenangan calon walikota dan wakil walikota Makassar dalam pemilihan umum. Oleh karena itu disinilah peran partai politik dan para calon walikota dan wakil walikota Makassar dalam sosialisasinya untuk mencari dukungan dan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013 sehingga dapat memberikan suatu pemahaman tentang tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kota Makassar dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013 sehingga dapat membantu untuk menjelaskan mengenai masalah apa saja yang dihadapi pemilih pemula untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada uraian diatas maka sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013 (Studi pada pelajar di tingkat sekolah menengah atas di Kota Makassar)”.

## ***B. Batasan Masalah***

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu meluas maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada pemilih pemula yang berstatus pelajar di sekolah menengah atas di Kota Makassar.
2. Penelitian ini hanya sampai pada tahap mengetahui partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

## ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013?
2. Faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013?

## ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### ***1. Tujuan Penelitian***

Adanya permasalahan pemilihan umum mengenai partisipasi politik pemilih pemula pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terkecuali di

kotaMakassar menjadi suatu ketertarikan untuk mengkajinya. Sehingga tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

## *2. Kegunaan Penelitian*

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan dan memberi sumbangan pengetahuan tentang partisipasi politik pemilih pemula yang ideal dalam pemilihan umum, serta memberikan informasi mengenai hubungan antara partisipasi politik, pemilih pemula, dan pemilihan umum walikota Makassar.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi politik, pemilih pemula, dan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Sehingga dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

Selain itu manfaat penelitian ini ditujukan pula bagi masyarakat terkhusus pemilih pemula agar dapat memahami apa itu partisipasi politik, bentuk partisipasi,

dan pemilu sehingga pemilih pemula memiliki pengetahuan dan berminat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi;

- a) Bagi KPU Kota Makassar, data yang didapatkan dalam penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula di Kota Makassar agar dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum.
- b) Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa yang telah didapatkan di bangku kuliah, selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.
- c) Bagi pemilih pemula, agar dapat memahami apa itu partisipasi politik dan dapat memberikan gambaran bagaimana budaya politik yang baik dan benar.
- d) Bagi sekolah tempat penelitian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang partisipasi politik bagi pelajar sekolah menengah atas.
- e) Manfaat Ilmiah Penelitian
  - 1) Penelitian ini ditujukan sebagai kontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik dikalangan pemilih pemula dalam pemilihan umum.
  - 2) Kegunaan bagi partai politik, calon walikota dan wakil walikota serta KPU sebagai acuan untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum.

- 3) Dengan tercapainya beberapa tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi pemilih pemula agar dapat memahami apa itu pemilu dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

#### **A. Hasil Penelitian Yang Memiliki Tema Mengenai Partisipasi Politik**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurasma Arifin tahun 2012 tentang “RELASI ETNIK MENJELANG PEMILUKADA SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 DI KOTA MAKASSAR”.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurasma Arifin mengatakan bahwa masalah etnisitas memang seringkali menjadi masalah yang serius di tengah masyarakat yang multi etnik, apalagi dalam momen-momen tertentu seperti pemilukada karena terjadi persaingan-persaingan antar actor dari berbagai etnik untuk mendapatkan sumber-sumber terbatas seperti kekuasaan kepala daerah. Dalam Kota Makassar ada banyak kelompok etnik yang mewakili suku, agama ataupun kelompok-kelompok yang menyatakan keanggotaannya. Apabila dilihat dari pengertian luas kelompok etnik maka setiap orang bisa berada dalam beberapa komunitas etnik. sehingga lingkungan itu akan memiliki pengaruh dalam perilaku politik seseorang.

Komunitas atau kelompok Etnik yang ada di Kota Makassar sangat banyak, mereka berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki satu kesamaan baik itu suku, agama, ideologi, profesi, kepentingan dan lain-lain. Dalam penelitian ini

penulis telah melakukan penelitian di beberapa komunitas etnik yang ada di Kota Makassar untuk melihat bagaimana konflik dalam relasi etnik menjelang pemilukada Sulawesi selatan 2013 nanti.

Demokrasi yang terbuka memberikan ruang kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Membuka kesadaran primordial bagi masyarakat tertentu untuk menunjuk seseorang dari kelompoknya untuk menjadi kepala daerah. Serta membuka ruang bagi para elit politik membangun isu primordial untuk memobilisasi pilihan masyarakat etnik tertentu kepadanya.

Daerah yang plural ditambah dengan kondisi kota yang akan melaksanakan pemilukada memang konflik cenderung besar terjadi dalam interaksi masyarakat di kehidupan sehari-hari karena relasi etnik dan pemilukada akan saling mempengaruhi. Meskipun di Makassar tidak terjadi konflik fisik dalam kehidupan bermasyarakat. Namun Hasil penelitian yang didapatkan dari pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Makassar yang berasal dari komunitas-komunitas etnik yang ada di Kota Makassar menggambarkan bahwa konflik itu ada dalam relasi etnik menjelang pemilukada Sulawesi selatan 2013.<sup>3</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh MUHAMMAD ADAM MUBARAK BADENG tentang “DAMPAK KAMPANYE TERHADAP PEROLEHAN

---

<sup>3</sup>Nurasma Arifin, *Relasi Etnik Dalam Pemilukada Sulawesi Selatan Tahun 2013 Di Kota Makassar*, (UNHAS Makassar: Sebuah Skripsi, 2012). Hal 63-64

## SUARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR PERIODE 2009 -2014”.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adam Mubarak Badeng mengatakan bahwa fenomena politik menjelang diadakannya perhelatan pemilihan umum kepala daerah Kota Makassar tahun 2008 lalu begitu mendominasi pemberitaan pada kolom-kolom media cetak maupun media siar di Kota Makassar. Khususnya pada media cetak, hampir di setiap sudut kolom terhiasi oleh beragam pemberitaan mengenai pemilu. Hal ini dapat kita lihat pada harian Fajar edisi bulan Oktober tahun 2008.

Melihat adanya kekuatan peranan media yang sangat kuat dan terasa dalam menyampaikan pesan-pesan politik, hampir semua kandidat memanfaatkan media sebagai wadah sosialisasi dan untuk meraih dukungan serta popularitas di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar. Akan tetapi sebagian kandidat ada juga yang tidak menggunakan media sebagai sarana kampanye dengan berbagai alasan dan asumsi yang ada.

Terlepas dari semua itu, yang menjadi fokus penelitian penulis dalam penelitian kali ini adalah kandidat yang menggunakan media cetak sebagai sarana kampanye untuk meraih dukungan perolehan suara pada pemilu Kota Makassar.

Reformasi politik tahun 1998 lalu telah merubah seluruh tatanan sistem politik Indonesia. Khususnya dalam bidang politik dan informasi komunikasi. Saat ini kedua bidang tersebut tidak lagi terbelenggu dalam pusaran pemerintahan. Semuanya telah diberikan kebebasan dalam menyampaikan pesan dan ekspresinya masing-

masing. Seperti halnya politik, saat ini media telah banyak dipergunakan sebagai wadah sosialisasi politik. Media tidak hanya mempengaruhi politik dan opini publik, namun secara luas bertindak sebagai agen politik, melakukan proses pengemasan pesan dan proses inilah yang sebenarnya membuat sebuah peristiwa atau aktor politik memiliki nilai jual tersendiri.<sup>4</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh ANUGRAH BAYU PRATAMA tentang “DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009”.

Penelitian yang dilakukan oleh A bayu Pratama mengatakan bahwa sistem pemilu tahun 2009 untuk memilih caleg DPRD Kota Makassar untuk pertama kalinya menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Yaitu sistem pemilu yang merupakan masih turunan dengan Sistem Pemilu Reprntasi Proporsional Daftar (List Proporsional Representation) penjelasan umum mengenai sistem pemilu ini ialah Pemilih memilih partai politik yang mereka sukai dan dalam partai tersebut, juga memilih kandidat yang mereka inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai tersebut. Biasanya, jumlah kandidat dalam daftar partai yang ditampilkan dalam surat suara adalah dua kali jumlah kursi yang tersedia. Kata daftar terbuka dan tertutup dapat diartikan adanya kebebasan pemilih untuk memilih wakil caleg yang di sukai oleh masyarakat. Sementara itu

---

<sup>4</sup>Muhammad Adam Mubarak Badeng, *Dampak Kampanye Terhadap Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah kota Makassar Periode 2009-2014*, (UNHAS Makassar: Sebuah Skripsi, 2011). Hal 52-53

adanya sistem suara terbanyak di dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka ialah sebagai prasyarat untuk caleg dinyatakan sebagai pemenang di dalam pilleg di satu dapil.

sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak mempunyai banyak kelebihan dan kelemahan yang bisa mempunyai pengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat namun penulis hanya ingin menyoroti beberapa kelebihan serta kelemahan dari sistem pemilu ini yang bisa mempengaruhi perilaku memilih masyarakat pada saat pemilu legislatif di Kota Makassar.<sup>5</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. AKBAR tentang “BUDAYA POLITIK SANTRI PADA PONDOK PESANTREN DARUL ALQAM GOMBARA MUHAMMADIYAH MAKASAR (AN-16)”.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Akbar mengatakan Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Pesantren merupakan lembaga non formal tertua dalam tradisi pendidikan agama Islam di Indonesia, dimana pesantren tempat membina, mendidik santri sehingga mampu dan ahli dalam agama sekaligus menjadi manusia yang memanusiakan manusia (Pakuhumanika). Selain itu, pesantren mampu menjadi agen perubahan sosial dalam pembangunan masyarakat. Hal tersebut semata-mata karena kedekatannya dengan masyarakat yang mengakar dan sampai sekarang pun pesantren tetap menarik untuk diteliti dan dikaji. Keberadaan Pesantren di Indonesia dimulai

---

<sup>5</sup> Anugrah Bayu Pratama, *Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009*, (UNHAS Makassar: Sebuah Skripsi, 2012). Hal 40-41

sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa. Ini juga diungkapkan Ustad. Arsyad :

*“Pesantren adalah tempat menimba sekaligus memperdalam ilmu keagamaan (Islam) pesantren masih menjadi rujukan bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu keagamaannya dan pesantren juga memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia.”*

Pesantren juga sebagai penjaga moral “*moral force*” dan kepatuhan umat/masyarakat dalam menjalani kehidupan di dunia, karena kharisma seorang kyai/ulama. Pesantren merupakan sebuah pendidikan Islam yang mempunyai budaya tersendiri, berperan penting dibidang sosial keagamaan. Pesantren merupakan pusat perubahan dibidang pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan, bahkan pada perkembangan selanjutnya pesantren juga dapat menjadi salah satu pusat pengembangan masyarakat di bidang ekonomi. Pesantren membawa misi dakwah, karena didalamnya banyak santri yang datang untuk mendalami ilmu pengetahuan agama yang kemudian mereka akan menyebar keseluruh pelosok masyarakat untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan binaan aqidah dan spirit amal serta bermoral baik hingga tercipta kondisi yang stabil, aman dan nyaman, sejahtera dunia akhirat. Menurut Clifford Geertz pondok atau biasa disebut pesantren merupakan pusat sistem sekolah tradisional, sebuah pondok terdiri dari seorang guru-pemimpin

umumnya seorang haji, yang disebut kyai, dan sekelompok murid laki-laki yang berjumlah antara tiga atau empat ratus sampai seribu orang yang disebut santri.

Orientasi dan sikap politik santri bersumber dari dua pandangan dasar. Pertama, melihat dunia politik sebagai wilayah yang terbuka bagi partisipasi publik tanpa memandang kualitas keberagamaan. Kedua, melihat dunia politik sebagai realisasi kebenaran agama yang absolut dan hanya dikuasai sekelompok elit keagamaan dengan beragam sebutan seperti ulama, wilayatul faqih atau ahlul halil wal aqdi. Berdasarkan pandangan kedua, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik hanya melalui wilayah elit keagamaan yang di Indonesia dikenal dengan sebagai kelas kiai dan ulama atau pemimpin gerakan Islam. Inilah penyebab sulitnya santri berkomunikasi terbuka dan dialogis dengan publik.<sup>6</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Asty Baalwy tentang “REKRUITMEN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DALAM PROSES INSTITUSIONALISASI PARTAI DI KOTA MAKASSAR”.

Penelitian yang dilukan oleh Noor Asty Baalwy mengatakan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi elit politik sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Sudah saatnya Partai Politik mengubah mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elit politik yang berkualitas, cakap, kredible, integritas, legitimasi dan mempunyai

---

<sup>6</sup>M. Akbar, *Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Darul Alqam Gombara Muhammadiyah Makassar (AN-16)*, (UNHAS Makassar: sebuah Skripsi, 2012). Hal 63-65

kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Partai NasDem adalah kontestan baru dalam percaturan politik di Indonesia. Partai NasDem telah didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2011 dan telah lolos verifikasi di Kemenkuham. Dengan slogan “Gerakan Perubahan”, Partai NasDem pun mulai memperluas basisnya ke seluruh pelosok Indonesia guna mencari dukungan dalam menghadapi pemilu 2014. Institusional partai diatur sedemikian rupa dengan membawa konsep Restorasi Indonesia Menuju Perubahan yang berlandaskan kepentingan rakyat, salah satunya memperkuat basis di Kota Makassar.<sup>7</sup>

## ***F. Kerangka Teori***

### **A. Kajian Umum Tentang Partisipasi**

#### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan.

---

<sup>7</sup>Noor Asty baalwy, *Rekrutmen Partai Nasional Demokrat Dalam Proses Institusionalisasi Parta Di Kota Makassar*, (UNHAS Makassar: Sebuah Skripsi, 2012). Hal 66-67

Selain definisi tersebut, partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan massa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya. Mobilisasi politik tampak antara lain dalam upaya pengerahan sejumlah besar orang oleh golongan elite tertentu untuk mendengarkan pidato-pidato politik dalam suatu rapat umum, atau dalam upaya menggerakkan sejumlah besar orang untuk mengacaukan suatu kedutaan asing.<sup>8</sup>

Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Konsep partisipasi politik mencakup apa yang disebut apatisme politik, alienasi politik, dan kekerasan politik. Dalam suatu masyarakat terdapat orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersikap apatis terhadap urusan-urusan politik dan orang-orang yang teralienasi, terasing dari kehidupan politik. Selain itu terdapat juga orang-orang yang melakukan kekerasan politik. Perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun menumbuhkan motivasi orang untuk meningkatkan partisipasinya. Termasuk di sini, motivasi untuk menduduki jabatan puncak dalam bidang politik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007). Hal 147.

<sup>9</sup> Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Hal 148.

Dalam kehidupan politik masyarakat, tidak sedikit warga yang tidak ingin berpartisipasi atau tidak ingin terlibat dalam aktivitas politik, bisa dikatakan tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap proses perpolitikan. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi. Menurut Morris Rosenberg disebabkan karena yang pertama yaitu, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Anggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman bagi kehidupan warga tersebut mengakibatkan masyarakat tidak ingin terlibat karena adanya resiko yang mengancam kehidupannya. Menurut mereka tidak berpartisipasi merupakan pilihan terbaik.

Kedua, aktivitas politik dianggap sebagai sesuatu yang akan sia-sia. Anggapan masyarakat terhadap partisipasi politik merupakan hal yang akan sia-sia sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan seseorang dalam aktivitas politik. Hal ini dikarenakan ikut berpartisipasi dalam perpolitikan tidak akan memberikan manfaat bagi mereka sehingga muncul anggapan ikut berpartisipasi politik hanya menjadi tindakan yang sia-sia.

Ketiga, ketiadaan faktor untuk “memacu diri untuk bertindak” atau disebut juga sebagai “perangsangan politik”. Tidak adanya dorongan untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas politik, hal ini terjadi karena tidak adanya kebutuhan material atau immaterial yang akan didapatkan apabila ikut berpartisipasi sehingga tidak ada dorongan untuk berpartisipasi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). Hal 121

Pemikiran Morris Rosenberg, dapat kita pahami mengapa seseorang ingin berpartisipasi dalam aktivitas politik. alasan yang pertama yaitu tidak ada ancaman bagi dirinya apabila turut berpartisipasi, seperti ancaman kematian, tertutupnya peluang usaha untuk keterusan hidupnya. Sehingga ia ingin berpartisipasi dalam aktivitas politik

Kedua, ada manfaat yang didapatkan dari aktivitas politik. hal ini berlaku relative karena manfaat yang di dapatkan setiap orang berbeda-beda. Misalnya bagi seorang pengangguran yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif akan mendapatkan pekerjaan selama lima tahun apabila dia terpilih. Jadi dapat dipahami manfaat yang didapatkan dipahami melalui motif dari tindakan seseorang.

Ketiga, aktivitas politik memenuhi kebutuhan secara material dan immaterial bagi kehidupan seseorang. Dengan mempertimbangkan untung dan rugi dalam melakukan aktivitas politik seseorang mau melakukan aktivitas politik. misalnya bagi calon mendapatkan perhatian, dukungan, dan dorongan. Sementara untuk pemilih mendapatkan uang, beras dan lain-lain yang bersifat material.

Apa yang dikemukakan oleh Robert Lane dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi. *Pertama*, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis; *kedua*, sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan bagi penyesuaian social; *ketiga*, sebagai sarana untuk

mengejar nilai-nilai khusus; dan *keempat*, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.<sup>11</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Ada sedikit kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu: segera muncul dalam ingatan peranan para politisi profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai, dan para demonstran. Betapapun juga, penting untuk menempatkan posisi sebenarnya dari aktivis politik, dan melihat apakah terdapat semacam hubungan hirarkis antara peristiwa-peristiwa tadi. Barangkali saja, hirarki yang paling sederhana dan paling berarti ialah hirarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi.<sup>12</sup>

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) baik untuk memilih para calon wakil rakyat, atau memilih kepala negara. Dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik*, Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif

---

<sup>11</sup>Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, *Pengantar Sosiologi Politik*. Hal 121

<sup>12</sup>Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, *Pengantar Sosiologi Politik*. Hal 122

3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi politik
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi politik
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik
6. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal
9. Partisipasi dalam pemungutan suara (*voting*).<sup>13</sup>

Apayang dikemukakan oleh Rush dan Althoff mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang disebut hirearki partisipasi politik. hirearki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai sistem politik. Tetapi arti masing-masing tingkat partisipasi tersebut berbeda dari sistem politik yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada satu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Rush dan Althoff mengemukakan pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan, baik para pemegang jabatan politik maupun para anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka ini berkepentingan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan politik formal.Di bawah para pemegang jabatan-jabatan politik formal adalah para anggota dari berbagai organisasi politik atau semi politik.termasuk di sini adalah semua tipe partai poolitik dan kelompok

---

<sup>13</sup>Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Hal 148

kepentingan. Kesamaan antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada peranan keduanya sebagai agen-agen mobilisasi politik. Baik partai politik maupun kelompok kepentingan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan para anggota masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Tercakup dalam kegiatan tersebut adalah usaha mempertahankan gagasan, posisi, orang atau kelompok-kelompok tertentu melalui sistem politik yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Perbedaan antara kelompok kepentingan dan partai politik adalah kelompok kepentingan hanya memperjuangkan kepentingan dari kelompok mereka sedangkan partai politik memperjuangkan kepentingan publik. Jadi dapat dikatakan cakupan partai politik lebih besar dari kelompok kepentingan.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson meliputi:

- a) Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
- b) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar

---

<sup>14</sup> Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). Hal 123

orang. Seperti, kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif.

- c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e) Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalur menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.<sup>15</sup>

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Meningkat atau menurunnya tingkat partisipasi politik pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada dua faktor pendorong bagi menguatnya partisipasi politik. Pertama, meningkatnya pengetahuan tentang partisipasi politik

---

<sup>15</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hal 188-189

masyarakat. Kedua, penggunaan media komunikasi seperti, penyebaran koran atau media cetak, penggunaan teknologi seperti radio media televisi, dan sebagainya untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Frank Lindenfeld menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutanpun menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.<sup>16</sup>

Teralienasi yaitu terasing dari kehidupan perpolitikan yang mengakibatkan seseorang menjadi apati politik. Ada dua indikator yang menjelaskan pola partisipasi politik. Yang pertama, kesadaran politik yakni kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat tinggalnya. Kedua, kepercayaan politik yaitu penilaian terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, apakah pemerintah dan sistem tersebut dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Dengan menghubungkan antara kesadaran politik dan kepercayaan politik, kita dapat membagi partisipasi politik menjadi empat tipe, yaitu:

---

<sup>16</sup>Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, *Pengantar Sosiologi Politik*. Hal 156

- a) Partisipasi politik dapat dikatakan aktif apabila tingkat kesadaran dan kepercayaan politik tinggi.
- b) Partisipasi politik dikatakan apatis jika tingkat kesadaran dan kepercayaan terhadap politik rendah.
- c) Partisipasi politik militan-radikal apabila kesadaran politik seseorang tinggi, namun kepercayaan politik rendah.
- d) Partisipasi politik dikatakan pasif jika kesadaran seseorang terhadap politik rendah tetapi kepercayaan politik tinggi.<sup>17</sup>

Partisipasi politik yang dikemukakan di atas, ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan sistem. Selain itu ada faktor lain seperti gender, budaya politik, tingkat kekecewaan terhadap pemerintahan, dan kepemimpinan informal. Dalam sistem negara demokratis, partisipasi politik sangat penting, hal ini di dasari oleh keyakinan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilakukan dengan berpartisipasi dalam aktivitas politik untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat yang berpartisipasi dalam aktivitas politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui partisipasi yang dilakukannya kepentingan mereka akan tersalurkan atau diperhatikan yang akan berdampak secara tidak langsung mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dari partisipasi politik yang dilakukan.

---

<sup>17</sup>Miriam Budiarjo, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Hal 367

Kegiatan partisipasi politik di negara berkembang seperti Indonesia masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik.<sup>18</sup>

#### B. Landasan Teori

Di negara berkembang seperti Indonesia kegiatan partisipasi politik masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemikiran para ahli mengenai partisipasi politik;

---

<sup>18</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Hal 367

## 1. Teori Partisipasi Politik

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi pendekatan berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam hubungan dengan negara-negara baru memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>19</sup>

Rush dan Althoff melihat partisipasi sebagai sebuah dampak dari sosialisasi politik yang membuat individu terangsang untuk melakukan suatu tindakan ataupun terlibat dalam sistem politik.

Miriam Budiarto menggambarkan partisipasi politik pada negara-negara demokratis, konsep yang mendasari partisipasi politik adalah kedaulatan di tangan

---

<sup>19</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Hal 368

rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama untuk menentukan orang-orang akan memegang tampuk pimpinan.

Stephenson mengemukakan bahwa partisipasi adalah mencakup kerjasama dari semua pihak yang terkait, merupakan suatu arena dimana terjadi negosiasi. Harapan-harapan, persepsi-persepsi, serta sistem komunikasi akan mempengaruhi perilaku dan cara orang menginterpretasikan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>20</sup>

## 2. Teori Pilihan Rasional

Sementara itu Ramlan Subakti mengemukakan teori pilihan rasional yang melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa

---

<sup>20</sup>Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992). Hal 140

pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.<sup>21</sup>

Dikaitkan dengan perilaku politik masyarakat di Indonesia pada saat Pilkada, dapat dijelaskan secara sederhana. Ilustrasinya, apabila pasangan calon dipilih oleh pemilih (*voters*) berdasarkan kesamaan visi misi seperti yang ditawarkan oleh partai politik dalam kampanye dipersiapkan tidak akan mampu memenuhi keinginan pemilih, maka si pemilih akan melakukan perubahan pilihan sesuai dengan program yang ditawarkan oleh kandidat lain yang sesuai dengan pikiran si pemilih. Perilaku memilih yang berubah ini dimungkinkan karena pemilih mengambangi negara-negara berkembang sangat besar jumlahnya. Karena itu, program yang ditawarkan dalam pilkada bukanlah perkara main-main.<sup>22</sup>

Namun demikian, tidak sedikit warga yang juga tidak terlalu peduli dengan persoalan program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Sebagai apa pun program yang telah dibuat dan diusung, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mendapat uang saat kampanye, atau memperoleh atribut kampanye seperti kaos, topi, syal, stiker, dan bahkan dapat melihat artis-artis secara langsung dalam acara-acara kesenian yang diselenggarakan oleh para kandidat pilkada untuk menghibur pemilih mereka. Hal ini sangat wajar terjadi pada masyarakat pragmatis seperti di Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa tidak ada jaminan program yang ditawarkan akan terealisasi di kemudian hari. Oleh karenanya, hal yang sangat rasional bagi

---

<sup>21</sup>Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*. Hal 146

<sup>22</sup>Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Hal 201

mereka di masa kampanye adalah bagaimana mereka mendapat uang, mendapat atribut, atau dapat melihat artis idola saat kampanye.

Oleh sebab itu, tidak sedikit tim sukses yang merancang kegiatan kampanye (untuk merebut hati pemilih) dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas. Anggapan mereka, kampanye yang terlalu formal, serius, dan 'intelekt' tidaklah cocok dengan mayoritas warga masyarakat kita yang bertingkat pendidikan menengah (bahkan rendah). Bagi tim sukses dalam kubu ini yang terpenting dari kampanye adalah bagaimana memanfaatkan dana yang tersedia untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat. Karenanya, metode-metode, seperti: bagi-bagi Sembako, memberikan uang dalam jumlah puluhan hingga ratusan ribu (*fresh money*), sampai dengan membagikan baju, rompi, ataupun menyediakan hiburan bagi masyarakat merupakan cara kampanye terbaik. Jika ini yang dirujuk, maka sebenarnya, perilaku pemilih kita belum banyak berubah. Atau dalam bahasa sinis bahkan, perilaku pemilih kita tidak pernah berubah.<sup>23</sup>

### 3. Teori Kelas Sosial

Teori kelas sosial merupakan cerminan distribusi kekuasaan, kelas sosial dapat dilihat melalui penggolongan berdasarkan kekuasaan, pendidikan, kekayaan dan lain sebagainya. Contohnya dilihat dari pekerjaan, seorang dokter yang memiliki pendidikan tinggi tentunya lebih paham politik karena memiliki pemikiran yang lebih luas dan kesadaran yang tinggi, berbeda dengan seorang petani atau nelayan yang

---

<sup>23</sup>Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal 202

hanya lulusan sekolah dasar. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang lebih bagus membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi. Begitu pula pada tingkat pendapatan, seorang pedagang yang berpenghasilan kecil pasti lebih memilih berdagang dari pada berpartisipasi dalam politik berbeda dengan orang yang berpendapatan tinggi seperti pengusaha karena jumlah pendapatan juga mempengaruhi akses dan kesempatan dalam melakukan sesuatu. Sama halnya dengan kekayaan, hampir mirip dengan pendapatan. Selain hal tersebut terdapat juga faktor gender, budaya politik, tingkat kekecewaan terhadap pemerintahan, dan kepemimpinan informal.

Karakteristik sosial seseorang, seperti status ekonomi, ras atau etnis, usia, seks dan agamanya, baik masyarakat yang hidup di daerah pedesaan atau di kota, termasuk dalam organisasi sukarela tertentu dan sebagainya, semua mempengaruhi partisipasi politiknya.<sup>24</sup>

Dari penjelasan para ahli tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena apabila masyarakat sadar bahwa dia diperintah oleh seorang pemimpin maka masyarakat akan menggunakan hak suara dalam pelaksanaan pemerintahan. Kesadaran seperti ini dimulai dari masyarakat yang berpendidikan yang memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi dari masyarakat awam.

---

<sup>24</sup>Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, *Pengantar Sosiologi Politik*. Hal 167

### C. Arti Penting Pemilihan Umum

Pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota) secara langsung telah dilaksanakan di beberapa daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di tanah air tercinta, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Mengamati keberhasilan pelaksanaan yang digelar padabeberapa daerah di tanah air sejak tahun 2005 silam, sebenarnya telah berhasil mencapai tujuan dasar demokrasi prosedur. Begitu pandangan Cornelis Law dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.<sup>25</sup>

Lebih jauh Cornelis memaparkan bahwa dari sudut demokrasi prosedur ala *Schumpeterian*, Pilkada langsung telah menghasilkan pimpinan daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan demokratis bebas, adil, dan nir kekerasan. Kedua, Pilkada langsung merupakan kelanjutan dari praktek pemilihan sebelumnya, tapi sekaligus telah meletakkan dasar baru bagi sebuah mekanis pertukaran elite secara regular. Pilkada merupakan kelanjutan karena tradisi pemilihan kepala daerah sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Tetapi ia sekaligus meletakkan tradisi baru, karena untuk pertama kalinya terjadi perubahan metode dari pemilihan tidak langsung oleh lembaga legislatif di daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD) kearah pemilihan langsung oleh setiap warga. Perubahan ini memiliki dampak serius pada berbagai aspek politik lokal

---

<sup>25</sup>KPU Kota Makassar, *Pemilukada Makassar 2008 Sebuah Testimoni Demokrasi*. (Makassar: Fajar Gafika Makassar 2008). Hal 17

dan sekaligus dapat dibaca sebagai investasi politik sangat penting dalam kerangka pendalaman demokrasi. Hal terakhir ini terkait erat dengan terjadinya proses institusionalisasi politik (demokrasi) dalam makna *Hungtingtonian* yang diasumsikan sebagai tulang punggung dari terbentuknya stabilitas dan keberlanjutan sistem secara keseluruhan.

Ketiga, Pilkada langsung telah meletakkan fondasi baru bagi berlangsungnya proses pendidikan politik warga secara lebih luas. Pilkada langsung telah menjadi salah satu ajang penting pendidikan mengenai politik sebagai sebuah “konsentrasi” dan mengenai kenormalan dari “kalah” dan “menang” dalam sebuah proses konsentrasi yang jujur dan adil.<sup>26</sup>

Pilkada langsung bukan hanya dibaca sebatas sebagai pesta demokrasi lokal, melainkan merupakan instrument bagi proses pendalaman demokrasi, *deepening democracy*. Pilkada dapat dimaknai sebagai proses ganda yang berlangsung di sisi negara dan di sisi masyarakat. Sebagai instrument dan proses *deepening democracy*, Pilkada langsung di satu sisi merupakan kelanjutan pelaksanaan pemilihan presiden langsung 2004, tapi perkenbangan politik lokal, yakni penciptaan *effective governance* paska terpilihnya pemimpin daerah yang baru.<sup>27</sup>

#### D. Dinamika Pemilukada

Untuk memberi gambaran pelaksanaan pemilukada, para anggota KPU Kota Makassar memberikan ulasanya sesuai lingkup tugasnya masing-masing. Pandangan

<sup>26</sup>KPU Kota Makassar, *Pemilukada Makassar 2008 Sebuah Testimoni Demokrasi*. Hal 20

<sup>27</sup>KPU Kota Makassar, *Pemilukada Makassar 2008 Sebuah Testimoni Demokrasi*. Hal 21

dan ulasan mereka menjadi pengalaman menarik untuk disimak. Sebab mereka inilah yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pemilu.

Sejak perubahan sistem pemilihan umum pada Pemilu 2004 silam, status warga negara dalam daftar pemilih tidak lagi disebut Wajib Pilih, melainkan Pemilih Terdaftar. Bagi pemilih terdaftar, memilih tentu bukan lagi kewajiban, tetapi menjadi hak. Karena menjadi hak, maka keputusan untuk memilih atau tidak memilih menjadi urusan sepenuhnya secara subyektif pada pemilik hak itu. Si pemilik hak bisa menggunakan haknya atau tidak. Selain itu, ketika seseorang tidak menggunakan haknya, maka tentu tidak masuk akal jika ada pihak lain atau orang lain atau orang lain selain dari pemilik hak untuk keberatan akibat tidak digunakannya hak itu. Sebaliknya, jika pemilik hak tidak menggunakan hak pilihnya itu, yang bersangkutan tidak melanggar.

Ibaratnya seseorang berhak untuk berbicara. Ketika seseorang itu memutuskan tidak berbicara, ia tidak melanggar apa pun karena berbicara bukan kewajiban, melainkan hak. Orang atau pihak lain juga tidak berwenang berkeberatan atau bersoal untuk dan atas nama orang yang tidak menggunakan hak bicaranya itu. Perumpamaan hak memilih serupa juga dengan contoh hak berbicara tersebut.<sup>28</sup>

Dengan demikian, hak memilih tentu disandingkan secara individual atau pribadi, bukan secara kolektif. Ketika seseorang tidak memperoleh hak untuk memilih, maka oknum yang bersangkutan secara pribadi yang berwenang secara hukum mengajukan keberatan, bukan partai politik, bukan orang lain, atau bukan

---

<sup>28</sup>KPU Kota Makassar, *Pemilukada Makassar 2008 Sebuah Testimoni Demokrasi*. Hal 57

organisasi apapun. Jika semisalnya ada 400 orang tidak terdaftar atau memperoleh hak sebagai pemilih, maka 400 orang itulah yang secara pribadi-pribadi menggugat atau mengajukan komplain. Oleh karena itu, tentu salah dan lucu, ketika ada tiga orang dari 400 orang itu bertindak untuk dan atas nama 397 orang sisanya itu menggugat atau keberatan.

Pada beberapa penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah selama ini, banyak pihak atau lembaga tertentu membuat kekeliruan yang lucu secara hukum. Mereka atau lembaga-lembaga, misalnya, mengajukan keberatan atau komplain kepada pemerintah atau KPU ketika banyak orang tidak terdaftar atau tidak memperoleh hak sebagai pemilih, yang mestinya berhak secara hukum untuk keberatan adalah mereka yang tidak terdaftar atau tidak memperoleh hak sebagai pemilih, bukan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lain.

Kurang lebih inilah gambaran tentang hak pilih yang disandang oleh pemilih terdaftar. Kata kuncinya adalah, sistem pemilu sekarang menerapkan hak pilih, bukan wajib pilih. Jika seorang pejabat atau pihak-pihak tertentu masih menggunakan istilah wajib pilih, bisa disebutkan bahwa orang itu masih menggunakan paradigma pemilu Orde Baru.<sup>29</sup>

Pada pemilu-pemilu yang diselenggarakan rezim Orde Baru, pemilih didaftar langsung oleh penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan/desa. Petugas yang mendata itu disebut Panitia Pendaftaran Pemilu atau Pantarlih. Mereka yang telah didaftar, wajib hukumnya memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara. Secara

---

<sup>29</sup>KPU Kota Makassar, *Pemilukada Makassar 2008 Sebuah Testimoni Demokrasi*. Hal 58

informal, seseorang yang terdaftar sebagai wajib pilih lantas tidak memilih, kepentingannya akan diisolasi dari urusan-urusan pemerintahan, baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun pada kantor-kantor instansi pemerintah lainnya.

Kekeliruan juga kerap terjadi pada pengertian tentang siapa-siapa saja warga negara yang berhak didaftar sebagai pemilih. Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2008, yang berhak didaftar sebagai pemilih adalah warga negara yang terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar. Jadi, seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar, tidak dengan sendirinya memperoleh hak pilih. Sebab, tidak semuanya penduduk Kota Makassar telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih. Mereka yang tercatat sebagai penduduk Kota Makassar, hanya memperoleh hak untuk didaftar sebagai pemilih, belum memperoleh hak untuk memilih.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa atau hak mana yang berwenang untuk mendaftarkan seorang penduduk pada suatu daerah sebagai pemilih. Jika disimak sistematika pengolahan data pemilih untuk pemilihan umum, baik pada UU 32/2004, PP 06/2005, UU 22/2007, maupun UU 12/2008, maka ada dua pihak yang memiliki wewenang itu, yakni pemerintah dan oknum yang bersangkutan.

Oknum penduduk yang bersangkutan juga tetap diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri tetapi pada jalur yang berbeda seperti dilakukan oleh pemerintah. Penduduk yang dimaksud adalah mereka yang tidak didaftarkan pemerintah melalui format DP4. Penduduk ini mendaftarkan diri langsung melalui kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh perangkat KPU di tingkat desa/kelurahan, yaitu

Panitia Pemungutan Suara (PPS).PPS memeriksa dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pendaftar, dan kemudian dicatat pada daftar pemilih tambahan jika telah memenuhi syarat.<sup>30</sup>

## ***G. Metode Penelitian***

### ***1. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 yang dilaksanakan di Kota Makassar, dengan menggunakan responden pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Makassar. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan dilaksanakan pada 18 November 2013 sampai 23 November 2013.
2. Tahap pelaksanaan dilaksanakan 24 November 2013 sampai 20 Desember 2013.
3. Tahap laporan dilaksanakan pada 21 Desember 2013 sampai 18 Januari 2014.

### ***2. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah mixed methods research. Metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan

---

<sup>30</sup>KPU Kota Makassar, *Pemilukada Makassar 2008 Sebuah Testimoni Demokrasi*. Hal 59-60

kuantitatif. Hal itu mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan mengombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian.<sup>31</sup>

### 3. Populasi, Informan Dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian yang akan diteliti yaitu pemilih pemula yang dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

#### b) Informan

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan topik “Sosialisasi yang Dilakukan KPU Kota Makassar Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013” dengan menggunakan informan pelajar dari SMA N 1 Makassar sebanyak 2 orang, SMK N 8 Makassar sebanyak 2 orang dan MAN 2 Model Makassar sebanyak 3 orang dengan total 7 pelajar sebagai informan.

#### c) Sampel

Banyaknya populasi pemilih pemula yang ada di Kota Makassar maka tidak mungkin untuk mendata satu persatu pemilih pemula di Kota Makassar. Agar memudahkan dalam proses penelitian ini akan menggunakan sampel 100 pelajar yang akan diambil dari beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Makassar yang

---

<sup>31</sup>Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Alfabeta, CV, 2012). Hal 404

dipilih dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* dengan usia 17-18 tahun karena usia tersebut merupakan usia pemilih pemula dalam pemilihan umum.

Sekolah yang terpilih adalah SMA N 1 Makassar dengan populasi siswa kelas XII sebanyak 32 siswa perkelas dari 9 kelas yaitu 6 kelas IPA dan 3 kelas IPS dengan total jumlah siswa kelas XII sebanyak 288 siswa, SMK N 8 Makassar dengan populasi siswa kelas XII sebanyak 28 siswa perkelas dari 4 program studi, keahlian pariwisata dengan kompetensi keahlian akomodasi perhotelan dan kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, program studi keahlian tata boga, kompetensi keahlian jasa boga, dan kompetensi keahlian patiseri, program studi keahlian tata busana, kompetensi keahlian tata busana, program studi keahlian kecantikan, kompetensi keahlian kecantikan kulit, kompetensi keahlian kecantikan kulit dan kompetensi keahlian kecantikan rambut dengan total 10 kelas dengan total jumlah siswa kelas XII sebanyak 280 siswa dan MAN 2 Model Makassar dengan populasi siswa kelas XII sebanyak 34 siswa perkelas dari 9 kelas yaitu 6 kelas IPA dan 3 kelas IPS dengan total jumlah siswa kelas XII sebanyak 306 siswa. Jadi keseluruhan jumlah populasi siswa dari SMA N 1 makassar, SMK N 8 Makassar, dan MAN 2 Model Makassar sebesar 974 siswa.

Berdasarkan pertimbangan peneliti, alasan pemilihan sekolah karena SMA N 1 Makassar, SMK N 8 Makassar, dan MAN 2 Model Makassar merupakan sekolah yang memiliki karakter bidang keilmuan yang berbeda, SMA N 1 Makassar yang merupakan sekolah umum, SMK N 8 Makassar yang merupakan sekolah kejuruan yang memiliki basic praktikum, dan MAN 2 Model Makassar yang identik dengan

penanaman ilmu keagamaan yang kental dengan kultur islam. SMA N 1 Makassar, SMK N 8 Makasar, dan MAN 2 Model Makassar juga merupakan sekolah unggulan yang ada di Makassar yang memiliki kemajuan signifikan baik secara akademis maupun non akademis bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain setingkatnya yang ada di Makassar. Adapun pertimbangan tersebut antara lain:

1. Peneliti banyak melihat peningkatan di SMA N 1 Makassar, SMK 8 Makassar, dan MAN 2 Makassar baik secara akademis maupun non akademis dibandingkan sekolah-sekolah lain di Makassar.
2. Lulusan SMA N 1 Makassar, SMK 8 Makassar, dan MAN 2 Makassar selalu menempati rating teratas dalam dan berhasil menembus Perguruan Tinggi favorit di Makassar.
3. Mengalami peningkatan jumlah murid yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu ada kaitannya dengan persepsi yang semakin baik di mata masyarakat terhadap sekolah.
4. Pihak sekolah khususnya siswa selalu terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan terutama pada hari-hari besar keagamaan, hal ini menunjukkan adanya kemajuan pendidikan baik dalam *written curriculum*, *ekstrakurikuler* maupun *hidden curriculum*, yang kemudian menjadi alasan terjadinya partisipasi masyarakat.
5. Lokasi yang cukup strategis mudah diakses oleh lembaga pemerintah, mudah terjangkau arus transportasi, dan sumber-sumber informasi lainnya, dan tentu dekat dengan pemukiman penduduk.

Dilihat dari konteks partisipasi masyarakat ketiga sekolah ini berupaya mencerdaskan putra-putri Makassar yang berasal dari berbagai kecamatan di kota Makassar, yakni : Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalate, Biringkanaya, Manggala, Rappocini, dan Tamalanrea. Keempatbelas kecamatan tersebut merupakan daerah asal dari sebagian besar murid yang ada di SMA N 1 Makassar, SMK N 8 Makassar, dan MAN 2 Makassar.

Sampai saat ini telah terjadi perkembangan yang kompetitif antara ketiga sekolah tersebut. Lulusan dari ketiga sekolah tersebut selalu menempati rating teratas dan selalu dapat menembus Perguruan Tinggi paporit di Makassar.

Untuk lebih jelasnya berikut daftar sekolah dan jumlah sampel pelajar dari sekolah tersebut:

**Tabel 1** Daftar Sekolah dan Jumlah Sampel

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
SMA N 1 Makassar	35
SMK N 8 Makassar	35
MAN 02 Model Makassar	30
<b>Total Responden</b>	<b>100 Pelajar</b>

*Keterangan: Nama sekolah dan jumlah sampel dalam penelitian*

### 3. *Subyek dan Obyek Penelitian*

1. Subyek yang akan diteliti dalam penelitian adalah pemilih pemula yaitu yang berasal dari SMA N 1 Makassar, SMK N 8 Makasar, MAN 2 Model Makassar yang termasuk dalam pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.
2. Obyek materi dari penelitian ini adalah partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

### 4. *Metode Pengumpulan Data*

Dalam proses penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Metode *Library Research*

*Library Research*, melakukan penelitian di perpustakaan dan mengkaji buku dan literature ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun teknik penulisan yang digunakan yaitu:

- 1) Kutipan langsung, mengutip bahan referensi kepustakaan tanpa merubah redaksi sedikitpun.
- 2) Kutipan tidak langsung, analisa yang dilakukan setelah membaca referensi dan rujukan berupa kesimpulan dan komentar.

## 2. Metode *Field Research*

*Field Research*, melakukan penelitian langsung lapangan untuk mendapatkan data untuk penelitian yang dibahas. Dalam hal ini menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Interview, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.
- 2) Kuesioner (angket), teknik pengumpulan data dengan cara memberi daftar pertanyaan kepada responden.

### 1. Sumber Data

Data yang didapatkan bersumber dari:

- 1) Data primer, tanggapan dan jawaban dari responden untuk pertanyaan yang diberikan mengenai tema yang sedang diteliti.
- 2) Data sekunder, data yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang berkenaan mengenai tema yang sedang diteliti.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### 1) Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data: data yang diperoleh langsung dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data lalu laporan-laporan tersebut direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

- b. Display data: data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan tambahan secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data, yakni menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik. Dengan demikian, penulis dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.
- c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi: adapun data yang didapat itu dijadikan acuan untuk mengambil dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang bersifat kuantitatif akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan tersebut, Peneliti akan berupaya memberikan pandangan dan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2) Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk memperoleh hasil penelitian, diperlukan adanya sebuah perancangan untuk melakukan analisa pada data yang telah dikumpulkan. Selain itu, diperlukan adanya pengujian pada hipotesis yang telah ditetapkan setelah mengumpulkan data kualitatif dengan wawancara terhadap 7 orang informan. Berikut penjelasan masing-masing mengenai rancangan analisis dan uji hipotesis.

### a. Analisis Kualitatif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Tujuan dari

riset deskripsi adalah untuk memaparkan objek yang diteliti dan menentukan hipotesis yang selanjutnya di uji secara kuantitatif.

b. Analisis kuantitatif

Dikarenakan data yang ada berupa angka yang disusun dalam suatu daftar, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik kuantitatif, untuk mengetahui tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

#### ***H. Sistematika Penulisan***

Untuk mendapatkan gambaran awal mengenai penelitian, maka akan dijelaskan sekilas tentang garis-garis besar isi, sebagai berikut:

Pada bab I, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, batasan masalah, manfaat penelitian, metode yang digunakan, tinjauan pustaka yang meliputi tentang kajian umum tentang partisipasi politik yang memuat pengertian, bentuk-bentuk partisipasi, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, kerangka teori untuk penelitian, arti penting pemilihan langsung, dinamika pemilukada dan garis-garis besar isi.

Pada bab II, terdapat gambaran umum:

1. Gambaran umum Kota Makassar.
2. Gambaran umum lokasi penelitian.

Pada bab III, memuat analisis tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013:

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2013.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2013.

Pada bab IV, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menguraikan inti dan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### *A. Gambaran Umum Kota Makassar*

Secara geografis, letak Kota Makassar sangat strategis menjadi simpul jasa distribusi. Pengembangan Makassar sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan dalam wilayah nusantara.

Hal tersebut tentu mempunyai konsekuensi bagi pemerintah Kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kebesaran Makassar pada masa lalu yang tidak hanya dikenal sebagai kota besar di nusantara, tetapi juga sebagai salah satu kota besar dunia karena keterbukaan akses Makassar terhadap perdagangan internasional.

Kota ini terletak di pantai barat pulau Sulawesi atau selat Makassar pada koordinat 119° 24' 17" 38 "bujur timur dan 5° 8' 6" 19" lintang selatan. Wilayah tersebut berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, Kabupaten Gowa di sebelah selatan dan selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayahnya 175,77 kilometer persegi, meliputi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>KPU Kota Makassar, *Pemilukada Makassar 2008 Sebuah Testimoni Demokrasi*, (Makassar: Fajar Grafika Makassar 2008). Hal 7-8

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.352.136 jiwa yang terdiri dari 667.681 laki-laki dan 684.455 perempuan. Sebenarnya, terdapat penduduk pada pagi hingga sore hari dan menjelang malam hingga subuh hari. Perubahan dan Perbedaan ini terjadi karena pergerakan penduduk dari kabupaten-kabupaten pinggir kota yang melakukan berbagai aktifitas di dalam kota. Diperkirakan jumlah penduduk Kota Makassar pada hari hingga sore hari lebih dari dua juta jiwa.<sup>2</sup>

Pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang sangat tinggi dan kepadatan penduduk juga tinggi karena banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke wilayah ini baik karena faktor ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Populasi penduduk Kota Makassar mayoritas berpendidikan SMP, SMA dan untuk Pendidikan Tingkat Diploma dan Sarjana tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan studi keperguruan tinggi. Kepercayaan religius sebagian besar menganut Islam Muhammadiyah, NU, Jam'ah Tabliq, Hizbut Tahrir, Katolik dan Kristen Protestan serta Kristen Pantekosta selain itu terdapat juga Budha dan Konghuchu serta Hindu, suku terbesar di Kota Makassar adalah Bugis dan Makassar, terdapat juga etnis lokal Toraja, Mandar, Luwu serta etnis pendatang, Bali, Jawa, Tionghoa yang sudah mendiami ratusan tahun serta etnis lain. Mata pencaharian penduduk Kota Makassar sebagian besar distruktur pemerintahan pejabat negara dan PNS, pegawai swasta retail, buruh, BUMN, nelayan, guru, TNI, Polri, dan pedagang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2012.

<sup>3</sup>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2012.

Berikut dapat kita lihat pada tabel 2 tentang jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan di Kota Makassar:

**Tabel 2** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2011

No	Kode wil.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	010	Mariso	28.101	28.307	56.408
2	020	Mamajang	29.085	30.474	59.560
3	030	Tamalate	85.279	87.227	172.506
4	031	Rappocini	74.077	78.454	152.531
5	040	Makassar	40.616	41.862	82.478
6	050	Ujung Pandang	12.805	14.355	27.160
7	060	Wajo	14.415	15.223	29.639
8	070	Bontoala	26.684	28.030	54.714
9	080	Ujung Tanah	23.603	23.530	47.133
10	090	Tallo	67.888	67.686	135.574
11	100	Panakukkang	70.663	72.066	142.729
12	101	Manggala	59.008	59.183	118.191
13	110	Biringkanaya	83.996	85.344	169.340
14	111	Tamalanrea	51.462	52.713	104.175
Kota Makassar			667.681	684.455	1.352.136

Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 172.506 jiwa atau sekitar 12,76% dari total penduduk, disusul kecamatan Biringkanaya sebanyak 169.340 jiwa (12,52%). Kecamatan

Rapoccinisebanyak 152.531 jiwa (11,28%), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.160 jiwa (2,01%). Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 32.730 jiwa/km<sup>2</sup> persegi, disusul kecamatan Mariso 30.993 jiwa/km<sup>2</sup>, kecamatan Mamajang 26.471 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedang kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.272 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian diurutkan kedua ada kecamatan Biringkanayadengan kepadatan penduduk sekitar 3.512 jiwa/km<sup>2</sup> terus diurutkan ketiga ada kecamatan Manggala dengan kepadatan penduduk sekitar 4.896 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian diikuti kecamatan Ujung Tanahdan kecamatan Panakkukang diurutkan keempat dan kelima dengan kepadatan penduduk sekitar 7.935 jiwa/km<sup>2</sup> dan 8.371 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berikut dapat kita lihat pada tabel 3 dan 4 tentang jumlah penduduk dirinci menurut rasio jenis kelamin dan persentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Makassar:

**Tabel 3** Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Rasio Jenis Kelamin Kota Makassar  
Tahun 2011

No.	Kode wil.	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	010	Mariso	28.101	28.307	56.408	99,27
2	020	Mamajang	29.085	30.474	59.560	95,44
3	030	Tamalate	85.279	87.227	172.506	97,77
4	031	Rappocini	74.077	78.454	152.531	94,42
5	040	Makassar	40.616	41.862	82.478	97,02
6	050	Ujung Pandang	12.805	14.355	27.160	89,20
7	060	Wajo	14.415	15.223	29.639	94,69
8	070	Bontoala	26.684	28.030	54.714	95,20
9	080	Ujung Tanah	23.603	23.530	47.133	100,31
10	090	Tallo	67.888	67.686	135.574	100,30
11	100	Panakuk kang	70.663	72.066	142.729	98,05
12	101	Manggala	59.008	59.183	118.191	99,70
13	110	Biringkanaya	83.996	85.344	169.340	98,42
14	111	Tamalanrea	51.462	52.713	104.175	97,63
Kota Makassar			667.681	684.455	1.352.136	97,55

*Sumber :Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012*

Data pada tabel 3 merupakan jumlah penduduk kota Makassar dirinci menurut rasio jenis kelamin pada tahun 2011. Data tersebut menggambarkan bahwa rasio penduduk berjenis kelamin perempuan lebih besar dari laki-laki. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis

kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki.

**Tabel 4** Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di KotaMakassar Tahun 2011.

No.	Kode wil.	Kecamatan	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk
1	010	Mariso	4,17	30.993
2	020	Mamajang	4,40	26.471
3	030	Tamalate	12,76	8.536
4	031	Rappocini	11,28	16.526
5	040	Makassar	6,10	32.730
6	050	Ujung Pandang	2,01	10.327
7	060	Wajo	2,19	14.894
8	070	Bontoala	4,05	26.054
9	080	Ujung Tanah	3,49	7.935
10	090	Tallo	10,03	23.254
11	100	Panakukkang	10,56	8.371
12	101	Manggala	8,74	4.896
13	110	Biringkanaya	12,52	3.512
14	111	Tamalanrea	7,70	3.272
Kota Makassar			100,00	7.693

*Sumber :Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012.*

Secara sosiologis, Kota Makassar didiami oleh masyarakat dengan latar belakang etnik, sub etnik, suku, budaya dan agama yang berbeda-beda. Kondisi ini mencerminkan miniatur Indonesia. Suku terbesar adalah Makassar dan agama dengan

populasi terbesar adalah Islam. Sedangkan pertumbuhannya sebesar 8,09 persen pada tahun 2007 dengan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Rp 14.846.981. pertumbuhan ini jelas menunjukkan adanya dinamika perekonomian yang relatif kondusif.<sup>4</sup>

Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh empat lapangan usaha yang memberikan sumbangan sekitar 80,61 persen. Keempat lapangan usaha tersebut adalah perdagangan, hotel dan restoran (30,11%), industry pengolahan (24,00%), angkutan dan komunikasi (13,32%), serta jasa-jasa (13,18%).<sup>5</sup>

**Tabel 5** Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 di Kota Makassar

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	67.309	56.306	123.615
10 – 14	124.982	122.202	247.184
15 – 24	127.091	159.669	286.760
25 – 54	238.483	263.094	501.577
55 – 64	33.854	36.742	70.596
65+	18.551	24.066	42.617
Jumlah	610.270	662.079	1.272.349

Sumber : Bappeda – BPS, Makassar dalam angka 2012

Pada Tabel 5 nampak struktur penduduk menurut umur di Kota Makassar. Persentase penduduk yang baru memasuki usia 15-24 tahun di Kota Makassar yaitu sebesar 127.091 laki-laki dan 159.669 perempuan atau sebesar 22.54 persen dari total penduduk Kota Makassar. Sedangkan persentase penduduk yang termasuk dalam

<sup>4</sup>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2012.

<sup>5</sup>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2012.

kelompok usia 25-54 tahun di Kota Makassar adalah sebesar 238.483 laki-laki dan 263.094 perempuan atau sebesar 39,42 persen dari total penduduk Kota Makassar. Selanjutnya proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yaitu mereka yang telah berusia 65 tahun ke atas di Kota Makassar adalah sebesar 18.551 laki-laki dan 24.066 perempuan atau sebesar 3,35 persen dari total penduduk Kota Makassar.<sup>6</sup>

Rumusan visi Kota Makassar tahun 2014 sebagai bagian pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, yakni “Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan dari visi pemerintah Kota Makassar tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni “Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar

---

<sup>6</sup> Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2012.

Nomor 6 tahun 2009 adalah “Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”.<sup>7</sup>

Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : *Pertama*, yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan global. *Kedua*, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai denganketerbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Selanjutnya visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 (lima) tahunan pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar kawasan timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan visi pemerintah Kota Makassar tahun 2010 sebagai berikut : “Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”.Visi tersebut mengandung makna :

---

<sup>7</sup>Profil Kota Makassar Tahun 2012.

1. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya;
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar;
3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

Berdasarkan visi pemerintah Kota Makassar tahun 2010 yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Kota Makassar tahun 2025, maka dirumuskan misi pemerintah Kota Makassar tahun 2010 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal;
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan;
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik.<sup>8</sup>

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup untuk melihat perkembangan pendidikan dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, jumlah murid yang telah bersekolah dan angka partisipasi sekolah. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus diupayakan, untuk meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah, dan dengan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia pelaku aktif dari

---

<sup>8</sup>Profil Kota Makassar Tahun 2012.

seluruh kegiatan tersebut. Pada tahun 2012/2013 di Kota Makassar, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 448 unit dengan jumlah guru sebanyak 5.747 orang dan jumlah murid sebanyak 148.179 orang. Jumlah SMP sebanyak 172 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.368 orang dan jumlah murid sebanyak 59.878 orang. Jumlah SMA 110 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.589 orang dan jumlah murid sebanyak 41.738 orang.<sup>9</sup>

### ***B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### **1. Sejarah singkat SMA N 1 Makassar**

SMA Negeri 1 Makassar pada awalnya merupakan Sekolah Pendidikan Zaman Pemerintahan Belanda yang dikenal dengan nama AMS Makassar dan pada tahun 1950 berubah menjadi SMA ABC Makassar di bawah pimpinan Bapak Yatmo (1950-1952) dan pada tahun 1957 beralih menjadi SMA Negeri 1 Makassar. SMA Negeri 1 Makassar yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 53 Makassar. Dalam perkembangan SMA Negeri 1 Makassar dari tahun ke tahun semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sekolah yang favoritkan di Indonesia Bagian Timur, dengan segudang pengalaman dan kegigihan para pendidik untuk memajukan pendidikan di daerah ini, SMA Negeri 1 Makassar berkembang dengan pesatnya, terbukti dari standar NEM penerimaan siswa baru yang meningkat setiap tahunnya, demikian pula dengan mutu lulusan yang ditelorkannya yang berhasil

---

<sup>9</sup>Data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2012.

melampaui tes saringan EBANAS dan UMPTN baik dari segi kuantitas maupun kualitas.<sup>10</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap mutu sekolah ini tidak hanya dilihat dari segi pendidikan Intrakurikuler. Kegiatan Ekstrakurikuler juga mendapat perhatian khusus dalam perkembangan sekolah ini. Kampus SMA Negeri 1 Makassar tidak pernah sepi dari segala macam kegiatan siswa untuk memacu potensi dan prestasi, siswa tidak peduli pagi atau sore, panas atau hujan, ada mid atau lagi libur semua waktu dimanfaatkan oleh siswa dengan sebaik-baiknya semua seolah-olah berjalan secara alami.<sup>11</sup>

Besar harapan kita semua semoga kemajuan yang telah dicapai tersebut tidak membuat kita lerna dan cepat merasa puas diri, justru hal itu merupakan cambuk untuk terus berkarya dan berprestasi untuk kemajuan negeri ini.

Visi: *“Menjadi Sekolah yang Unggul dalam Mutu dan Prestasi , Beriman, Bertaqwa, Berbudi Pekerti Luhur, Berilmupengetahuan, dan Teknologi serta Menjunjung Tinggi Nilai Budaya Lokal dalam Kompetisi Global”*

Misi: a) Melaksanakan proses pendidikan dengan mengacu kepada pengembangan 8 Standar Nasional Pendidikan. b) Melaksanakan pengembangan pengelolaan sekolah mengacu kepada ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu (QMS). c) Memiliki prestasi dalam berbagai bidang Sains, Olah raga, Seni

---

<sup>10</sup>Profil SMA N 1 Makassar Tahun 2012.

<sup>11</sup>Profil SMA N 1 Makassar Tahun 2012.

Budaya, baik di tingkat Nasional maupun Internasional. d) Melaksanakan ajaran agama menurut agama yang dianut. e) Mengembangkan perilaku akhlak mulia dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila. f) Mengembangkan dan Menerapkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam School Management System (SMS) dan Learning Management System (LMS). g) Mengembangkan dan menerapkan nilai budaya Sulawesi Selatan dalam kehidupan persekolahan (Siri, Lempu, warani, dan acca). h) Menghasilkan luaran yang dapat bersaing dalam kompetisi nasional dan global.<sup>12</sup>

## 2. Sejarah singkat SMK N 8 Makassar

Pada tanggal 27 Nopember 1947/1950 OSVO (Opleiding School Voor Onderwyseres) dengan Kepala Sekolah bernama JUP DYK.SGKP pada tahun 1951 (Sekolah Guru Kepandaian Putri) dengan lama pendidikan 4 tahun. Kepala SGKP waktu itu adalah : Ny. Mogot Wenas Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, maka pada tahun 1964 SGKP mengalami perubahan Kurikulum. Pada tahun 1968 namanya menjadi SKKA (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas) lama Pendidikan 3 tahun, dengan jurusan Bagian A dan B yaitu Menjahit dan Memasak. Kepala SKKA Pertama dijabat oleh Ms. Yasin, kedua di jabat Ms. Rachma Manoppo, dan ketiga di jabat Ny. Dunga.<sup>13</sup>

Beberapa tahun kemudian nama SKKA berubah menjadi SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga), tepatnya pada tahun 1976/1977 sampai dengan

---

<sup>12</sup>Profil SMA N 1 Makassar Tahun 2012.

<sup>13</sup>Profil SMK N 8 Makassar Tahun 2012.

tahun pelajaran 1993/1994. Jurusan Tata Boga, Tata Busana dan Tata Graha. Pada tahun 1994/1995 diberlakukan Kurikulum baru. Nama SMKK berubah menjadi SMK sehingga kurikulum 1994/1995 disebut Kurikulum SMK kelompok Pariwisata dan pada tahun 1997 menjadi SMK Negeri 8 Makassar dengan Kepala Sekolah Drs.Ainus Balohe,M.Pd dan kemudian berganti Kepala Sekolah pada tahun 2004 yaitu Drs.Daru Pranoto dan kemudian hingga saat ini dikepalai oleh Dra.Hj.Siti Saenab,M.Pd.<sup>14</sup>

Dengan Program keahlian adalah Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan dan Akomodasi Perhotelan Hotel dan Restoran yang dahulu terpisah dengan Akomodasi Perhotelan dan Boga, saat ini dua program keahlian tersebut menjadi satu dan masuk dalam kelompok program unggulan SMKN 8 Makassar. Dalam perkembangannya bidang ini menjadi sangat populer karena mendapat kesempatan untuk bekerjasama dengan Industry Luar Negeri dimulai pada tahun 1986 hingga sekarang, seperti; Malaysia, Singapore hingga ke daratan Eropa seperti London (Inggris).<sup>15</sup>

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang semakin pesat, maka SMKN 8 Makassar mulai membenahi sistem pembelajaran yang mengacu pada Kompetensi, dengan alur pembelajaran blok yang dibagi dalam 3 group yaitu Normatif/Adaptif, Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan yang sudah berlangsung sejak tahun 1998 hingga saat ini. SMK N 8 Makassar beralamat di Jalan Mongisidi No.17 Makassar.

---

<sup>14</sup>Profil SMK N 8 Makassar Tahun 2012.

<sup>15</sup>Profil SMK N 8 Makassar Tahun 2012.

Motto: Good, Better, Best

Visi: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata bertaraf Internasional  
(International Tourism Education and Training)

Misi: a) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata bertaraf Internasional (*Implementing International Tourism Education and Training*). b) Mengembangkan Program Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata bertaraf International (*Develop International Tourism Education and Training program*).c) Mengembangkan Program Pengabdian Masyarakat pada bidang Pariwisata (*Establish Tourism Community Development Program*).d) Mengembangkan Kemitraan Nasional dan Internasional (*Establish National and International Partnership*).<sup>16</sup>

### 3. Sejarah singkat MAN 2 Model Makassar

MAN 2 Model Makassar merupakan salah satu madrasah unggulan yang ada disulawesi selatan untuk itu keberadaannya perlu didukung oleh kesiapan infrastruktur dan managment yang cukup memadai. Sebagai sekolah umum berbasis agama Islam keberadaannya di Sulawesi Selatan ditandai dengan prestasinya di bidang akademik dan non akademik dilengkapi dengan kelengkapan infrastruktur gedung yang cukup representatif , saat ini MAN 2 Model madrasah memiliki 27 kelas paralel, dengan jumlah siswa lebih dari 900 siswa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Profil SMK N 8 Makassar Tahun 2012.

<sup>17</sup>Profil MAN 2 Model Makassar Tahun 2012.

MAN 2 Model memiliki kelengkapan laboratorium biokimia dan fisika (terpisah), laboratorium bahasa yang computerized, laboratorium multimedia dengan internet connection, serta masjid berlantai dua yang mampu menampung kurang lebih 800 jamaah. Visi dan misi MAN2 model Makassar yang dapat dirangkum dalam tiga kata Islamic, Unggul, Populis. terurai dalam penjabaran program kerja madrasah dan menjadi arah dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Persaingan yang demikian ketat diantara kompetitor sekolah-sekolah lain mengharuskan membuat perencanaan kegiatan yang lebih baik. Beberapa terobosan yang telah dilakukan seperti kelas unggulan disetiap tingkatan dengan kelas multimedia.<sup>18</sup>

MAN 2 Model Makassar sebagai kelanjutan dari program PGAN 4 tahun / 6 tahun terletak di Kecamatan Tamalate Kota Makassar letaknya di Jalan Sultan Alauddin No. 105 atau Jl. A. P. Pettarani No. 1 Makassar. MAN 2 Model Makassar dikelilingi oleh Kantor-Kantor Pemerintah dan swasta dan hubungan pendidikan. Letak MAN 2 Model Makassar sangat strategis karena masyarakat dapat menjangkau dengan mudah.

Visi: Terbentuknya Pribadi Muslim yang Berakhlakul Karimah, Unggul, dan Kompetitif.

Misi: a) Menyelenggarakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menarik (PAKEM) serta berkarakter untuk menumbuhkembangkan kemampuan siswa secara

---

<sup>18</sup> Profil MAN 2 Model Makassar Tahun 2012.

optimal. b) Menumbuh kembangkan semangat keunggulan dan budaya belajar yang tinggi kepada peserta didik untuk bersaing di tingkat sekolah, local, nasional dan internasional. c) Mengoptimalkan kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan diri sehingga siswa dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. d) Menumbuh kembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata. e) Mewujudkan madrasah yang berwawasan lingkungan (Green School). f) Meningkatkan komitmen seluruh tenaga pendidik dan kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya. g) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup>Profil MAN 2 Model Makassar Tahun 2012.

### ***C. Profil Singkat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013***

Kesepuluh pasangan calon yang lolos masing-masing empat pasangan dari jalur independen dan enam pasangan diusung partai politik. Berikut profil singkat kesepuluh pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

#### **1. Adil Patu – Istadi Zainal**

Pasangan ini melaju di pemilukada di dukung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Adil Patu adalah ketua PDK Sulawesi Selatan sementara Istadi Zainal merupakan salah seorang fungsionaris di Gerindra.

Salah satu program utamanya yang paling menarik minat warga Makassar, adalah program listrik gratis. Mereka mengaku, apabila keduanya terpilih sebagai walikota dan wakil walikota Makassar, warga pemakai daya listrik 450 watt tidak lagi membayar listriknya setiap bulan. Sementara warga pemakai daya 900 watt hanya membayar 50% atau setengah saja dari total tagihan listriknya setiap bulan.<sup>20</sup>

#### **2. Supomo Guntur – Kadir Halid**

Wakil walikota Makassar, Supomo Guntur kembali masuk dalam bursa Pemilukada Makassar. Namun kali ini ia bersama Kadir Halid, yang menjadi Calon wakil walikota Makassar. Supomo yang sebelumnya sukses mendulang dukungan

---

<sup>20</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

warga Makassar saat berpasangan dengan Ilham Arif Sirajuddin, mengandalkan program Layanan ambulans 24 jam. Pasangan ini didukung Parai Golkar dan PDIP.<sup>21</sup>

### 3. Rusdin Abdullah – Muh Idris Patarai

Ketua Asosiasi Rekanan Dagang dan Industri Indonesia (Ardindo) Sulawesi Selatan, Rusdin Abdullah yang maju di Pemilu Kota Makassar bersama Idris Patarai. Idris yang berlatar belakang birokrat atau mantan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, mendampingi Rusdin melalui jalur independen.<sup>22</sup>

### 4. Herman Handoko – Abdul Latif Bafadal

Calon walikota dan wakil walikota Makassar juga maju dari jalur perseorangan atau independen, adalah Herman Handoko – Abdul Latif Bafadal. Pasangan ini menawarkan program angkot gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat Makassar.<sup>23</sup>

### 5. Erwin Kallo – Hasbi Ali

Erwin yang seorang advokat ini menggandeng Dekan Fakultas Hukum Umi, Hasbi Ali di pemilu Kota Makassar ini. Keduanya menuju perebutan kursi pemimpin Makassar dari jalur independen.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

<sup>22</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

<sup>23</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

<sup>24</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

#### 6. Tamsil Linrung – Das'ad Abdul Latif

Politisi PKS, Tamsil Linrung maju dalam perhelatan lima tahunan Makassar, didukung partainya. Selain PKS, Tamsil berpasangan dengan Das'ad Latif juga didukung oleh Partai Hanura, dan Partai Bintang Reformasi. Dalam Pemilu ini, keduanya mengusung tagline bersama benahi Makassar, dengan program 3 R dalam penanganan sampah.<sup>25</sup>

#### 7. Sitti Muhyina Muin – Syaiful Saleh

Makassar bergerak menuju kota Moderen yang manusiawi, adalah tagline pasangan yang maju melalui jalur independen. Muhyina yang berlatar belakang politis, maju melalui jalur independen bersama Syaiful Saleh, yang juga mantan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Makassar.

#### 8. Moh Ramdhan Pomanto – Syamsu Rizal

Calon walikota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menggandeng ketua PMI Makassar, Syamsu Rizal MI di pemilu kota Makassar. Pasangan yang populer dengan akronim DIA didukung oleh Partai Demokrat dan PBB dengan program “Jamsurga” atau Jaminan Sosial Keluarga Serba Guna.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

<sup>26</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

#### 9. Irman Yasin Limpo – Busrah Abdullah

Kandidat yang diusung PAN dan PPP ini, berupaya menggaet pendukung melalui program peningkatan sumber daya masyarakat dan pengembangan pendidikan generasi sebagai investasi masa depan.

Pasangan Irman Yasin Limpo – Busrah Abdullah atau yang dikenal dengan sebutan NOAH tersebut, mengkampanyekan pendidikan gratis yang total dan linear. Menurutnya ini sebagai upaya mencapai pendidikan berkualitas serta perubahan mind set pemerintah dari orientasi kekuasaan menjadi orientasi pelayanan.<sup>27</sup>

#### 10. Apiaty Amin Syam – Zulkifli Gani Ottoh

Kandidat ini memiliki pendukung terbanyak dari partai politik, di pemelukada Makassar kali ini. Mereka didukung PKNU, Pelopor, PPI, Barnas PPPI, PKPB, Kedaulatan, PPN, PNI Marhaenisme, PPRN, Partai Buruh, Republikan, PMB, PIS dan Nasrep.

Apiaty adalah istri dari mantan gubernur Sulawesi Selatan, Amin Syam; sementara wakilnya, Zulkifli merupakan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

<sup>28</sup>Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).

### **BAB III**

#### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Mengidentifikasi pengetahuan yang menentukan partisipasi politik pemilih pemula pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar digelar, adalah bagaimana sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Makassar untuk memberi pemahaman mengenai pemilu terhadap pemilih pemula dalam menyambut pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. Berdasarkan dari hasil survey yang telah dilakukan dilapangan, dari 7 orang pelajar yang menjadi informan, terdapat 5 informan yang mengatakan apabila pihak KPU Kota Makassar melakukan sosialisasi langsung kepada pemilih pemula dapat meningkatkan pengetahuan pemilih pemula tentang pemilu. Selanjutnya terdapat 1 informan yang megatakan bisa jadi atau dapat diartikan kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pihak KPU Kota Makassar. Lain halnya yang dikatakan 1 informan yang mengaku tidak tertarik dengan pemilu.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan tentang sosialisasi pemilu dari pihak KPU Kota Makassar, menunjukkan bahwa apabila KPU Kota Makassar melakukan sosialisasi dapat meningkatkan minat pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Sebagaiman dikemukakan oleh salah seorang informan.

*“Iyah karena bisa membantu saya untuk mengetahui bagaimana cara memilih dengan baik dan benar dan juga supaya lebih paham mengenai pemilu”.*<sup>1</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula mengharapkan sosialisasi dari pihak KPU Kota Makassar untuk dapat memberikan pemahaman mengenai cara memilih dalam pemilu dengan baik dan benar sesuai ketentuan KPU Kota Makassar sehingga pemilih pemula paham mengenai pemilu.

Samahalnya yang dikemukakan oleh Annisa Oktafiani *“Bisa meningkatkan minat saya karena saya bisa lebih paham mengenai pemilu kalau pihak KPU datang kesekolah dan melakukan sosialisasi langsung mengenai pemilihan umum.”*<sup>2</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Makassar ke sekolah-sekolah di Kota Makassar dapat meningkatkan minat pemilih pemula dalam mengikuti pemilihan umum sehingga dapat mengurangi tingkat golput di kalangan pemilih pemula.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Gudwil, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 12.00 wita.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Annisa oktafiani, pelajar di SMK N 8 Makassar, 24 November 2013 pukul 11.45 wita.

Samahalnya yang dikemukakan oleh Isnawati *“Dengan datangnya KPU Kota Makassar kesekolah melakukan sosialisali pasti meningkatkan minat saya dan teman-teman yan lain untuk ikut mimilih dalam pemilu”*.<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula sangat mengharapkan kedatangan pihak KPU Kota Makassar ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sehingga semakin meningkatkan minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Begitu pula hal yang dikemukakan oleh Annisa Tis’a Ramadhany *“Pasti bisa berperan untuk meningkatkan minat saya untuk ikut memilih dalam pemilihan walikota”*.<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa dengan adanya sosialisasi KPU Kota Makassar ke sekolah-sekolah sangat berperan dalam minat pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Hal serupapun dikemukakan oleh Safira Furqani *“Saya bisa lebih mengeti kalau dijelaskan langsung sama pihak KPU tetang pemilu”*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Isnawati, pelajar di SMK N 8 Makassar, 24 November 2013 pukul 11.30 wita.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Annisa Tis’a Ramadhany, pelajar di SMA N 1 Makassar, 25 November 2013 pukul 13.30 wita.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Safira Furqani, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 12.45 wita.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa dengan adanya sosialisasi mengenai pemilu ke sekolah-sekolah oleh KPU Kota Makassar, pemilih pemula lebih mudah memahami mengenai pemilu dan bagaimana menggunakan hak pilih dengan baik dan benar.

Sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Muh. Arhamsyah *“Mungkin kalau ada pihak kpu yang datang kesekolah mengadakan sosialisasi saya dan teman-teman yang lain bisa lebih mengerti sehingga tertarik ikut memilih dalam pemilu”*.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula masi ragu untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, namun dengan adanya sosialisasi dari pihak KPU Kota Makassar ke sekolah-sekolah dapat memberikan pemahan mengenai pemilu sehingga meningkatkan minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dan mengurangi tingkat golput di kalangan pemilih pemula.

Lain halnya ang dikemukakan oleh Ahmad Lutfi *“Saya tidak percaya sama calon yang ada janji-janji saja yang diberikan tidak ada bukti”*.<sup>7</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa banyaknya janji-janji politik oleh para calon ketika telah menjabat yang tidak di laksanakan mengakibatkan pemilih pemula tidak tertarik untuk menggunakan hak

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Muh. Arhamsyah, pelajar di SMA N 1 Makassar, 25 November 2013 pukul 13.40 wita.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ahmad Lutfi, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 13.00 wita.

pilihnya, hal ini dapat di pengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, teman sepergaulan dan lain-lain sehingga mereka menjadi apolitis.

Rasa ingin tahu yang besar mengantarkan pemilih pemula untuk mengetahui apa itu pemilu. Oleh karena itu, pemilih pemula sangat mengharapkan adanya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Makassar tentang pemilu agar pemilih pemula dapat memahami apa itu pemilu sehingga dapat memicu ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Pertanyaan selanjutnya menggali ketertarikan pemilih pemula dengan adanya pihak KPU Kota Makassar yang melakukan sosialisasi tersebut ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi menarik bagi pemilih pemula. Terdapat 4 informan menyatakan bahwa dengan adanya pihak KPU Kota Makassar yang melakukan sosialisasi dapat menarik minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan 2informan mengatakan walaupun tidak ada sosialisasi dari KPU Kota Makassar dia sangat tertarik untuk mengikuti pemilu. Pernyataan sedikit berbeda dikemukakan oleh 1 informan yang mengatakan tidak tahu. Sedangkan 1 informan lainnya mengatakan tidak tertarik karena memilih untuk golput atau tidak memilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Berikut perolehan data wawancara dengan informan di lokasi penelitian yang menyatakan bahwa :

*“Kalau anggota KPU datang kesekolah untuk sosialisasi bisa menambah pengetahuan serta menarik minat untuk ikut memilih dalam pemilihan Walikota”<sup>8</sup>.*

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula di Kota Makassar sangat mengharapkan kedatangan pihak KPU Kota Makassar ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sehingga memberikan pemahaman bagi pemilih pemula mengenai pemilu dan meningkatkan minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Begitu pula hal yang dikemukakan oleh Muh.Arhamshyah *“Pihak KPU bisa memberikan arahan untuk melakukan partisipasi sehingga kami bisa tertarik untuk ikut serta dalam pemilihan Walikota”<sup>9</sup>.*

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula perlu di arahkan oleh pihak KPU Kota Makassar untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, tidak adanya arahan dari pemilih pemula yang tidak terlalu memahami pemilu menjadikan mereka tidak tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Sama halnya yang dikemukakan Muh.Arhamshyah, Annisa Oktafiani mengatakan hal serupa *“Saya sudah mengerti mengenai pemilu dan kalau pihak*

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Gudwil, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 12.00 wita.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Muh. Arhamshyah, pelajar di SMA N 1 Makassar, 25 November 2013 pukul 13.40 wita.

*KPU datang ke sekolah saya bisa lebih mengerti lagi sehingga saya bisa lebih tertarik untuk ikut memilih dalam pemilu”<sup>10</sup>.*

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pengaruh keluarga, lingkungan, dan media sangat membantu pemilih pemula dalam memahami pemilu. Namun alangkah lebih baik bila Pihak KPU Kota Makassar yang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar pemilih pemula lebih mudah memahami pemilu, sehingga pemilih pemula lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Isnawati yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan *“Dapat menarik minat saya karena saya bisa lebih paham mengenai pemilu dan bagaimana cara memilih dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan KPU Kota Makassar”<sup>11</sup>.*

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa dengan adanya sosialisasi mengenai pemilu ke sekolah-sekolah oleh pihak KPU Kota Makassar dapat menarik minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, dan pemilih pemula dapat mengetahui cara menggunakan hak pilih dengan baik dan benar sesuai ketentuan KPU Kota Makassar.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Annisa oktafiani, pelajar di SMK N 8 Makassar, 24 November 2013 pukul 11.45 wita.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Isnawati, pelajar di SMK N 8 Makassar, 24 November 2013 pukul 11.30 wita.

Lain halnya yang dikemukakan Ahmad lutfi “*Tidak tahu karena Pemilu Walikota kemarin saya tidak terdaftar dan tidak dapat kartu pemilih*”<sup>12</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa kurangnya pengetahuan pemilih pemula mengenai kepada siapa mereka melaporkan apabila tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu mengakibatkan pemilih pemula menjadi golput. KPU Kota Makassar hendaknya melakukan sosialisasi mengenai pemilu sehingga pemilih pemula tahu kemana mereka melaporkan jika tidak terdaftar dalam pemilu.

Safira Furqani yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan “*Walaupun tidak ada pasti sangat menarik karena di TV berita tentang pemilihan walikota Makassar semua acaranya dan saya sering menonton acara tersebut*”<sup>13</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa rasa ingin tahu yang tinggi saat usia remaja dan pengaruh media elektronik yang memberitakan mengenai pemilu dapat meningkatkan minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ahmad Lutfi, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 13.00 wita.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Safira Furqani, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 12.45 wita.

Annisa Tis'a Ramdhany yang ditemui di lokasi penelitian mengemukakan jawaban berbeda dari informan lain "*Siapun yang terpilih tidak ada bedanya sama saja, cuma janji kalau sudah terpilih tidak peduli lagi dengan rakyat*"<sup>14</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa seringnya para calon dalam pemilu ketika telah terpilih tidak melaksanakan janji sebelum terpilih mengakibatkan masyarakat tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Faktor lingkungan yang masyarakatnya apolitis dalam mempengaruhi pemilih pemula sehingga menjadi apolitis.

Berdasarkan pernyataan informan di lokasi penelitian, dapat dipahami bahwa pemilih pemula di Kota Makassar mengharapkan adanya sosialisasi dari KPU Kota Makassar agar pemilih pemula memiliki pemahaman mengenai pemilu, sehingga pemilih pemula tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan karena masih ada pemilih pemula yang tidak mengetahui kemana harus melapor ketika tidak terdaftar dalam pemilu sehingga mengakibatkan pemilih pemula tersebut tidak memilih atau golput.

Ketika ditanya mengenai apakah dengan tidak adanya sosialisasi dari pihak KPU Kota Makassar anda akan berpartisipasi dalam pemilihan umum atau tidak ikut berpartisipasi, 3 informan mengatakan akan mengikuti pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, 2 informan yang terpaksa tidak memilih karena tidak terdaftar

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Annisa Tis'a Ramadhany, pelajar di SMA N 1 Makassar, 25 November 2013 pukul 13.30 wita.

sehingga mengakibatkan golput, dan 2 informan mengatakan tidak ikut memilih karena memilih golput. Berikut perolehan data wawancara dengan informan di lokasi penelitian yang menyatakan bahwa:

*“Saya akan memilih dalam pemilu karena saya sudah terdaftar dan sudah dapat undangan dan kartu pemilih”<sup>15</sup>.*

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula yang menjadi informan di atas telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena terdaftar sebagai pemilih dan mendapat undangan serta kartu pemilih dalam pemilu.

Muh.Arhamasyah yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan *“Saya sudah dapat kartu pemilih dan ada calon yang saya sukai dan saya akan memilih calon yang saya sukai dalam pemilu”<sup>16</sup>.*

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa ketertarikan pemilih pemula mengikuti pemilu karena rasa ingin tahu yang tinggi dan adanya calon yang di sukai dalam pemilu sehingga pemilih pemula tertarik mengikuti pemilu untuk mendukung calon yang di sukainya.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Gudwil, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 12.00 wita.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Muh. Arhamasyah, pelajar di SMA N 1 Makassar, 25 November 2013 pukul 13.40 wita.

Isnawati yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan *“Saya sudah mengerti dan sudah ikut memilih karena sudah punya kartu pemilih untuk pemilihan Walikota Makassar”*<sup>17</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula yang menjadi informan di atas sudah memahami pemilu dan memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Annisa Oktafian yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan *“Pemilihan walikota kemarin saya tidak ikut memilih karena saya tidak terdaftar dan tidak punya kartu pemilih sehingga saya golput”*<sup>18</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa tidak maksimalnya pendataan pemilih dalam pemilu oleh KPU Kota Makassar dan tidak adanya sosialisasi yang di dapatkan oleh pemilih pemula kemana mereka harus melapor jika tidak terdaftar dalam pemilu mengakibatkan pemilih pemula tidak berpartisipasi atau menjadi golput dalam pemilu.

Ahmad Lutfi yang di temui di lokasi penelitian mengatakan *“Walaupun pihak KPU kesekolah melakukan sosialisasi, saya juga masi tidak memilih karena tidak terdaftar dan tidak dapat kartu pemilih, saya juga tidak tahu harus melapor keman*

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Isnawati, pelajar di SMK N 8 Makassar, 24 November 2013 pukul 11.30 wita.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Annisa oktafiani, pelajar di SMK N 8 Makassar, 24 November 2013 pukul 11.45 wita.

*kalau tidak terdaftar, kalau saya terdaftar saya juga pasti memilih, tapi karena tidak terdaftar saya cuma ikut kampanye karena diberi uang dan bensin gratis”<sup>19</sup>.*

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula yang menjadi informan tidak memilih dalam pemilu karena tidak maksimalnya pendataan pemilih oleh KPU Kota Makassar dan tidak adanya sosialisasi yang memberikan informasi kepada pemilih pemula kemana pemilih pemula tersebut melapor jika tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sehingga pemilih pemula tersebut hanya mengikuti kampanye salah satu calon karena diberi uang dan bensin gratis.

Annisa Tis’a Ramdhany yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan “*Saya golput dan golput adalah pilihan saya*”<sup>20</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula yang menjadi informan di atas tidak memilih karena lebih memilih golput, hal ini terjadi ketidakpercayaan pemilih pemula terhadap calon yang ada dan ketidakpahaman mengenai pemilu sehingga pemilih pemula tersebut lebih memilih golput.

Safira Furqani yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan “*Saya tidak percaya sama calon Walikota yang ada, jadi saya memilih golput dalam pemilu*”<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Ahmad Lutfi, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 13.00 wita.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Annisa Tis’a Ramadhany, pelajar di SMA N 1 Makassar, 25 November 2013 pukul 13.30 wita.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa ketidak pahaman mengenai pemilu dan ketidak percayaan terhadap calon yang ada mengakibatkan pemilih pemula mimilih untuk golput, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan teman sepergaulan sehingga pemilih pemula tersebut memilih untuk golput atau tidak memilih.

Berdasarkan jawaban informan dari hasil wawancara di atas menunjukkan pemilih pemula sangat tertarik untuk mengikuti pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban pemilih pemula yang mengatakan akan ikut berpartisipasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. Namun ada juga pemilih yang mengikuti kampanye karena diberi imbalan sehingga ikut dalam kampanye salah satu calon namun tidak memilih karena tidak terdaftar. Ada pula yang tidak mengikuti kampanye dan terpaksa tidak memilih atau golput karena tidak terdaftar. Dari wawancara dengan informan tersebut, ada juga informan yang mengatakan lebih memilih golput dengan alasan tidak mempercayai calon yang ada sehingga lebih memilih untuk tidak memilih atau golput.

Pertanyaan berikutnya mengenai apakah dengan adanya sosialisasi tersebut pesan yang akan disampaikan oleh pihak KPU Kota Makassar dapat ditangkap oleh pemilih pemula. Dari jawaban yang diberikan informan sama, yaitu dengan adanya

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Safira Furqani, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 12.45 wita.

sosialisasi pesan yang akan disampaikan KPU Kota Makassar terhadap pemilih pemula akan tersampaikan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Isnawati di lokasi penelitian yang mengatakan *“Dengan datangnya pihak KPU Kota Makassar kesekolah pesan yang ingin disampaikan bisa disampaikan langsung”*<sup>22</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa KPU Kota Makassar hendaknya melakukan sosialisasi mengenai pemilu ke sekolah-sekolah dan menyampaikan langsung pesan yang ingin disampaikan pada pemilih pemula sehingga pemilih pemula lebih mudah memahami pemilu.

Annisa Oktafiani yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan *“Sudah pasti tersampaikan karena pihak KPU langsung datang kesekolah melakukan sosialisasi sehingga saya bisa tahu bagaimana melakukan partisipasi dalam pemilu”*<sup>23</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula mengharapkan kedatangan pihak KPU ke sekolah untuk mengadakan sosialisasi sehingga pemilih pemula dapat memahami pemilu dan memahami bagaimana cara berpartisipasi dalam pemilu sesuai dengan peraturan KPU Kota Makassar.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Isnawati, pelajar di SMK N 8 Makassar, 24 November 2013 pukul 11.30 wita.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Annisa oktafiani, pelajar di SMK N 8 Makassar, 24 November 2013 pukul 11.45 wita.

Annisa Tis'a Ramdhany yang ditemui di lokasi penelitian juga mengatakan demikian *“Pasti tersampaikan karena langsung orang KPU datang kesekolah melakukan sosialisasi dan saya dan teman-teman bisa mengerti tentang pemilu”*<sup>24</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa apabila pihak KPU Kota Makassar mengadakan sosialisasi mengenai pemilu ke sekolah-sekolah, dapat membantu pemilih pemula untuk memahami dan ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Muh. Arhamsyah yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan demikian *“Tersampaikan karena pihak KPU langsung kesekolah melakukan sosialisasi sehingga pesan yang ingin disampaikan pihak KPU tersampaikan dan mudah di pahami”*<sup>25</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula sangat mengharapkan kedatangan pihak KPU Kota Makassar untuk melakukan sosialisasi mengenai pemilu karena pemilih pemula beranggapan lebih mudah memahami pemilu apabila di jelaskan oleh pihak KPU Kota Makassar.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Annisa Tis'a Ramdhany, pelajar di SMA N 1 Makassar, 25 November 2013 pukul 13.30 wita.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Muh. Arhamsyah, pelajar di SMA N 1 Makassar, 25 November 2013 pukul 13.40 wita.

Gudwil yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan *“Iyah pasti karena langsung anggota KPU yang menjelaskan tentang pemilu”*<sup>26</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa pemilih pemula mengharapkan kedatangan pihak KPU Kota Makassar untuk mengadakan sosialisasi karena apabila pihak KPU Kota Makassar yang menjelaskan mengenai pemilu, pemilih pemula akan lebih mudah memahami pemilu sehingga pemilih pemula semakin tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Safira Furqani yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan *“Iyah, karena langsung orang KPU yang memberikan sosialisasi jadi kita bisa lebih mengerti tentang pemilu”*<sup>27</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa apabila pihak KPU mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah pemilih pemula akan lebih mudah memahami pemilu dan mengetahui bagaimana cara berpartisipasi dalam pemilu dengan baik dan benar sesuai ketentuan KPU Kota Makassar.

Ahmad Lutfi yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan *“Iyah karena kalau langsung pihak KPU kesekolah bisaki lebih paham mengenai pemilu Walikota”*<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Gudwil, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 12.00 wita.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Safira Furqani, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 12.45 wita.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa apabila pihak KPU Kota Makassar mengadakan sosialisasi mengenai pemilu, pemilih pemula lebih mudah memahami pemilu dan dengan adanya sosialisasi dari pihak KPU Kota Makassar dapat meningkatkan minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu sehingga mengurangi golput di kalangan pemilih pemula.

Hasil dari wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa apabila KPU Kota Makassar melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula maka pesan yang ingin disampaikan mengenai pemilu dapat tersampaikan, sehingga pemilih pemula dapat memahami apa itu pemilihan umum dan menjadi modal awal bagi pemilih pemula untuk menghadapi pemilu sehingga pemilih pemula tau harus melaporkan kemana jika dia tidak terdaftar sebagai pemilih sehingga golput pada pemilih pemula dapat berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan data yang didapatkan menunjukkan bahwa pemilih pemula kurang mendapat perhatian dari KPU Kota Makassar. Hendaknya KPU Kota Makassar membentuk tim khusus untuk menangani pemilih pemula, mulai dari mengenalkan peraturan, mempersiapkan, membimbing mereka dalam menggunakan hak pilih secara baik, mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu Intensifikasi pola komunikasi politik yang lebih komunikatif pada pemilih pemula harus dilakukan agar memudahkan mereka dalam memahami ketentuan

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Ahmad Lutfi, pelajar di MAN 2 Model Makassar, 26 November 2013 pukul 13.00 wita.

terbaru yang berlaku. Menyediakan media pendidikan politik khusus bagi pemilih pemula sangat perlu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Makassar dalam pemilu.

Hasil dari wawancara dengan informan di atas dapat dipahami bahwakurang diperhatikannya pemilih pemula oleh KPU Kota Makassar mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Data tersebut kemudian di uji dengan menggunakan metode kuantitatif dengan cara mengambil sampel 100 pelajar dari populasi pemilih pemula yang terdapat pada lokasi penelitian dengan menggunakan angket/kuesioner untuk mengetahui tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

#### ***A. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013***

Masyarakat Kota Makassar baru saja menggelar Pemilihan walikota dan wakil walikota pada 18 September 2013 lalu. Dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar, pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal MI (DIA) keluar sebagai peraih suara terbanyak dengan 182.484 suara atau 31,18 %, suara pasangan DIA mengungguli kesembilan pasangan kandidat lainnya. Dengan begitu, pilwali Makassar berlangsung dengan satu putaran saja.<sup>29</sup> Berikut

---

<sup>29</sup> Data hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Makasar tahun 2013

daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6** Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mariso	19,085	20,416	39,501
2	Mamajang	20,996	43,780	43,780
3	Makassar	30,463	62,173	62,173
4	Ujung Pandang	10,221	11,112	21,333
5	Wajo	13,147	13,495	26,642
6	Bontoala	19,013	20,034	39,047
7	Tallo	46,782	47,379	94,161
8	Ujung Tanah	16,541	17,196	33,737
9	Panakkukang	49,472	51,371	100,843
10	Tamalate	61,847	63,964	125,811
11	Biringkanaya	62,024	65,402	127,426
12	Manggala	43,033	44,566	87,599
13	Rappocini	53,608	56,725	110,333
14	Tamalanrea	37,120	38,702	75,822
<b>Jumlah</b>		<b>483,352</b>	<b>504,856</b>	<b>988,208</b>

Sumber : Data Dari KPU Kota Makassar , Tahun 2013

Tabel di atas merupakan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013 menurut kecamatan dan jenis kelamin pemilih tetap pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Data pada tabel 6 di atas diperoleh dari KPU Kota Makassar yang merupakan pihak penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

Data dari hasil rekapitulasi mengatakan persentase partisipasi pemilih menunjukkan angka 60%. Dari 988.208 jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 594.901 orang atau 60.20% yang menggunakan hak pilihnya. Sisanya sebanyak 393.307 orang atau 39.80% memilih tidak menggunakan hak suaranya. Dengan kata lain pemenang pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar adalah golput.<sup>30</sup>

Persentase ini ternyata tidak jauh berbeda dengan partisipasi pemilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2008 silam. Pada pelaksanaan pemilihan tersebut, pasangan IASmo (Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur) menjadi kandidat yang meraih suara terbanyak. Dari 959.814 jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 550.869 jiwa atau 58,48% yang menggunakan hak pilihnya. Sisanya 408.945 jiwa atau 41,52% memilih tidak menggunakan hak suaranya.

---

<sup>30</sup> Data hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Makasar tahun 2008

Pemilih pemula merupakan gelembung suarayang besar dan sangat strategis ketika akan diadakannya pemilihan umum baik pemilihan presiden, gubernur, anggota DPR, dan walikota dan wakil walikota Makassar. Dalam menghadapi proses demokrasi ini tentunya pemilih pemula mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Agar dapat berperan aktif dalam berpartisipasi tentunya pemilih pemula harus tahu mengenai pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar secara langsung.

**Tabel 7** Pengetahuan Pemilih Pemula Tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Secara Langsung

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu	75	75%
2.	Tidak Tahu	25	25%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Penelitian mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013, dari 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian, ternyata masih ada 25 orang atau 25% responden yang tidak mengetahui tentang pemilihan umum walikota dan wakil walikota Makassar secara langsung, hal ini disebabkan karena peran KPU Kota Makassar belum maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum terutama paada pemilih pemula yang ada di Kota Makassar. Dari data yang didapatkan menunjukkan rendahnya

partisipasi pemilih pemula di Kota Makassar pada saat pilwali Kota Makassar tahun 2013.

**Tabel 8** Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi Tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Orang tua	14	18,67%
2	Media	49	65,33%
3	Teman	9	12%
4	Lain-lain	3	4%
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Dari pertanyaan yang menggali darimana pemilih pemula mengetahui tentang pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar pada tabel 8 di atas, dari total 75 orang atau 75% responden yang mengetahui, dari alternatif jawaban yang ada, 14orang atau 14% responden mengatakan mengetahui mengatakan dari orang tua, 49 orang atau 49% responden mengatakan mengetahui dari media, 9orangatau 9% responden mengatakan mengetahui tentang pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar dari teman, dan 3 orang atau 3% responden mengatakan mengetahui tentang pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013 menjawab lain-lain.

**Tabel 9** Pengetahuan Pemilih Pemula Tentang Penggunaan Hak Suara Dalam Pilkada

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu	61	61%
2.	Tidak Tahu	39	39%
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Bagi pemilih pemula kesempatan ikut serta dalam pilwali Kota Makassar ini tentu menjadi sangat berarti karena hal ini akan menjadi pengalaman pertama dan akan menjadi pelajaran bagi para pemilih pemula di Kota Makassar. Dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 39 orang atau 39% responden tidak mengetahui kalau mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada pilwali Kota Makassar. Berkaitan dengan hal ini diharapkan peran guru sebagai tenaga pengajar di sekolah untuk menanamkan pengetahuan mengenai demokrasi sebagai wujud pengaplikasian ilmu yang didapatkan dalam pelajaran PKN, selain itu berkaitan dengan hal ini diharapkan peran KPU Kota Makassar agar dapat membantu pemilih pemula agar dapat terdata dalam pendataan calon pemilih karena dari data yang di dapatkan 39 orang atau 39% responden dari 100 responden tidak mengetahui bahwa mereka sudah dapat menggunakan hak pilihnya pada pilwali Kota Makassar tahun 2013.

**Tabel 10** Pengetahuan Pemilih Pemula Apakah Pemilih Pemula Tersebut Mengetahui  
Bahwa Dia Terdaftar Dalam Pemilu

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu	46	46%
2.	Tidak Tahu	54	54%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Dari 100 responden, yang mengetahui bahwa mereka telah terdaftar hanya 46 orang atau 46% responden yang mengetahui bahwa mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih dalam pilwali Kota Makassar dan 54 orang atau 54% responden menjawab tidak mengetahui bahwa dia terdaftar sebagai pemilih dalam pilwali Kota Makassar, itu artinya masih ada 54% responden yang tidak mengetahui apakah mereka sudah terdaftar atau belum. Dari data diatas tentunya tingkat partisipasi pemilih pemula tidak akan maksimal pada pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2013.

**Tabel 11** Distribusi Responden Berdasarkan Usaha Mendaftarkan Diri Dalam Calon Pemilih Sementara

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Menemui Ketua RT/RW	45	45%
2.	Tidak melakukan apa-apa	55	55%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Tabel 11 diatas menggali tentang hal ketidaktahuan pemilih pemula tentang penggunaan hak suaranya dan apakah upaya yang dilakukan pemilih pemula untuk mengetahui apakah mereka sudah terdaftar dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, ternyata dari 100 responden hanya 45 orang atau 45% yang berusaha menghubungi ketua RT/RW atau pejabat setempat sisanya 55 orang tidak melakukan apa-apa, tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat partisipasi pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada pilwali Kota Makassar.

KPU Kota Makassar merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk mensosialisasikan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013 kepada calon pemilih yang akan memilih dalam pilwali Kota Makassar. Fakta hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Makassar belum melakukan apa-apa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pilwali Kota Makassar.

Sosialisasi merupakan sebuah agenda yang sangat diharapkan oleh pemilih pemula dalam menghadapi pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, karena hal tersebut tentu sangat membantu mereka pada saat pencoblosan nantinya.

**Tabel 12** Sosialisasi KPU Kota Makassar Kepada Pemilih Pemula di Kota Makassar

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah	8	8%
2.	Belum pernah	93	93%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Dari 100 responden yang ditemui hanya ada 8 orang atau 8% responden yang pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, sedangkan 92 orang atau 92% responden menjawab belum pernah mengikuti sosialisasi. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa KPU Kota Makassar belum memprioritaskan sosialisasi terhadap pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

**Tabel 13** Harapan Pemilih Pemula Untuk Dapat Mengikuti Sosialisasi Dari KPU

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu	71	71%
2.	Tidak Tahu	29	29%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Sosialisasi tentunya sangat membantu pemilih pemula dan bisa menjadi motifasi bagi mereka untuk menggunakan hak suaranya, terlihat dari data yang dikumpulkan dilapangan bahwa dari 100 orang pemilih pemula 71 orang atau 71% diantaranya mengatakan bahwa mereka sangat mengharapkan untuk bisa mengikuti sosialisasi mengenai pemilihan umum oleh KPU Kota Makassar dan 29 orang atau 29% responden lainnya mengatakan tidak mengharapkan untuk bisa mengikuti sosialisasi.

**Tabel 14** Pengetahuan Pemilih Pemula di Kota Makassar Tentang Calon Walikota Makassar Tahun 2013

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu	75	75%
2.	Tidak Tahu	25	25%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Tabel 14 menggali pengetahuan pemilih pemula tentang siapa saja yang akan maju pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Dari 100 responden 73 orang atau 73% responden mengatakan mengetahui dan 27 orang atau 27% responden tidak mengetahui siapa saja yang akan maju dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

**Tabel 15** Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	27	27%
2.	Tidak	73	73%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Tabel 15 menggali tingkat partisipasi pemilih pemula dalam kampanye calon walikota dan wakil walikota tahun 2013. Dari 100 responden 27 orang atau 27% menjawab akan mengikuti kampanye calon walikota dan wakil walikota Makassar, dan 73 orang atau 73% mengatakan tidak akan mengikuti kampanye calon walikota dan wakil walikota Makassar.

**Tabel 16** Distribusi Responden Berdasarkan Alasan Mengikuti Kampanye Pilwali Kota Makassar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pengaruh keluarga	9	33,33%
2	Pengaruh teman	11	40,74%
3	Keinginan sendiri	7	25,93%
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Dari apa yang telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya bahwa partisipasi politik mempunyai arti yang sangat luas dan tidak hanya sebatas kepada melakukan penusukan gambar atau pemungutan suara saja tetapi mengikuti sosialisasi, ikut mensosialisasikan salah satu calon kepada orang lain, memberikan informasi tentang pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar juga merupakan wujud dari partisipasi. Partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula sangat menentukan hasil dari pilkada nantinya, selain dari itu partisipasi politik calon pemilih pemula juga sebuah pembelajaran yang sangat berarti dimasa yang akan datang.

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula ada yang bersifat mobilisasi dan ada yang bersifat kemauan atau kesadaran sendiri, dari 100 orang responden 27 orang atau 27% responden mengatakan akan ikut kampanye salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota dari 27 orang tersebut 9 orang atau 9% responden diantaranya mengatakan ikut karena diajak oleh keluarga, 11 orang atau 11% responden mengatakan diajak oleh teman karena dikasih unag atau barang berharga lainnya dan 7 orang lainnya atau 7% responden mengatakan ikut memang karena keinginan sendiri.

Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, partisipasi dibagi atas dua, ada yang dipaksa (*Mobilisasi*) dan ada dengan kesadaran sendiri (*Otonom*). Jadi menurut peneliti bahwa walaupun pemilih pemula mengikuti kampanye karena dibayar atau dengan kesadaran sendiri tetap disebut dengan berpartisipasi.

**Tabel 17** Distribusi Responden Berdasarkan Alasan Tidak Mengikuti Kampanye  
Pilwali Makassar 2013

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pengaruh keluarga	35	47,95%
2	Pengaruh teman	12	16,44%
3	Keinginan sendiri	26	35,61%
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh keluarga sangat besar untuk melarang pemilih pemula untuk ikut berkampanye. Dari 73 orang atau 73% responden yang tidak mengikuti kampanye, 35 orang atau 35% responden mengatakan karena pengaruh keluarga, 12 orang atau 12% responden mengatakan karena pengaruh teman dan 26 orang atau 26% responden mengatakan karena keinginan sendiri.

**Tabel 18** Distribusi Responden Berdasarkan Penilaian Terhadap Pencalonan Diri  
Walikota dan Wakil Walikota Yang Menjabat

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Iya	22	22%
2.	Tidak	33	33%
3.	Tidak Tahu	55	55%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Tabel 18 menggali penilaian pemilih pemula terhadap walikota dan wakil walikota Makassar yang sedang menjabat jika mencalonkan diri kembali. Dari 100 responden, 22 orang atau 22% responden mengatakan akan memilih, 33 orang atau 33% mengatakan tidak akan memilih, dan 55 orang atau 55% mengatakan tidak tahu apakah dia akan memilih jika walikota dan wakil walikota mencalonkan diri kembali.

**Tabel 19** Sikap Pemilih Pemula Terhadap Calon yang Sudah Dia Kenal

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Iya	26	38,80%
2.	Tidak	12	17,92%
3.	Tidak Tahu	29	43,28%
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

*(Dari 100 responden yang dimintai keterangannya hanya 67 orang yang mengatakan sudah mengetahui siapa calon walikota dan wakil walikota yang maju pada pilwali Kota Makassar tahun 2013)*

Tabel 19 menggali sikap pemilih pemula terhadap calon yang sudah dia kenal, dari 100 responden yang dimintai keterangan hanya 67 orang atau 67% responden mengatakan sudah mengetahui siapa calon walikota dan wakil walikota yang maju pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Dari 67 orang tersebut, 26 orang atau 26% mengatakan akan memilih, 12 orang atau 12% megatakan tidak akan memilih salah satu dari calon yang dia kenal, dan 29 orang atau 29% responden menjawab tidak tahu.

**Tabel 20** Alasan Pemilih Pemula Memilih Salah Seorang Calon yang Sudah Dia Kenal Pada Pilwali Kota Makassar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Menyukai salah seorang calon tersebut	9	34,61%
2	Pengaruh keluarga/teman	10	38,46%
3	Keinginan sendiri	7	26,93%
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

*(Dari 67 responden yang mengatakan sudah mengetahui calon pada pilwali Kota Makassar hanya 26 responden yang mengatakan akan memilih salah seorang calon yang akan maju tersebut)*

Tabel 20 menggali alasan pemilih pemula memilih salah satu calon yang dia kenal dalam Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013. Dari 26 responden yang mengatakan akan memilih, 9 orang atau 9% responden mengatakan memilih karena menyukai salah satu calon tersebut, 10 orang atau 10% responden mengatakan memilih karena pengaruh keluarga/teman, dan 7 orang atau 7% responden mengatakan memilih karena keinginan sendiri.

Terlepas dari itu semua data yang tampak pada tabel 18 dan 19 di atas menunjukkan bahwa calon pemilih pemula yang ada di Kota Makassar sebagian besar terpengaruh dengan lingkungan sekitar dan bisikan dari orang sekitarnya baik keluarga ataupun temannya. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pemilih pemula yang ada pada saat sekarang ini di Kota Makassar belum mengedepankan naluri politik yang dimilikinya karena belum mempunyai keinginan sendiri atau masih dimobilisasi atau dipengaruhi oleh pihak lain.

**Tabel 21** Alasan Pemilih Pemula Untuk Tidak Memilih Salah Seorang Calon yang Sudah Dia Kenal Pada Pilwali Kota Makassar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak menyukai salah seorang calon tersebut	5	41,67%
2	Pengaruh keluarga/teman	2	16,66%
3	Keinginan sendiri	5	41,67%
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

(Dari 67 responden yang mengatakan sudah mengetahui siapa yang akan maju pada pilwali nanti ada 12 responden yang mengatakan tidak akan memilih salah seorang calon yang akan maju tersebut)

Tabel 21 menggali alasan pemilih pemula untuk tidak memilih salah satu calon yang sudah dia kenal dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makasar tahun 2013. Dari 12 responden yang mengatakan tidak akan memilih, 5 orang atau 5% mengatakan tidak memilih karena tidak menyukai calon tersebut, 2 orang atau 2% responden mengatakan tidak memilih karena pengaruh keluarga/teman, dan 5 orang atau 5% responden mengatakan karena keinginan sendiri.

**Tabel 22** Pandangan Pemilih Pemula Terhadap Golput

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	61	61%
2.	Tidak setuju	39	39%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden

Terkait dengan perilaku tidak memilih atau golput, 100 orang responden yang dimintai pendapatnya tentang golput 61 orang atau 61% responden mengatakan setuju dengan tindakan golput dan 39 orang atau 39% responden mengatakan tidak setuju dengan golput tersebut.

**Tabel 23** Alasan Pemilih Pemula Kenapa Dia Setuju Dengan Golput

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak mempercayai calon yang ada	58	95,08%
2	Pengaruh keluarga/teman	3	4,92%
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

(Dari 100 responden yang mengatakan setuju dengan golput adalah 61 orang)

Tabel 23 menggali alasan pemilih pemula kenapa dia setuju dengan golput. Dari 61 orang atau 61% yang mengatakan setuju dengan golput tersebut 58 orang atau 58% responden mengatakan karena tidak percaya kepada calon-calon yang ada dan 3 orang atau 3% responden mengatakan karena pengaruh teman atau keluarga sehingga dia setuju dengan golput.

**Tabel 24** Alasan Pemilih Pemula Kenapa Dia Tidak Setuju Dengan Golput

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kesadaran sendiri	23	60,57%
2	Pengaruh keluarga/teman	8	20,75%
3	Memiliki calon walikota dan wakil walikota	7	18,68%
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

*(Dari 100 responden yang mengatakan tidak setuju dengan golput adalah 39 orang)*

Tabel 24 menggali alasan pemilih pemula kenapa dia tidak setuju dengan golput. Dari 39 responden yang mengatakan tidak setuju dengan golput 23 orang atau 23% responden mengatakan karena kesadaran sendiri, 8 orang atau 8% responden lainnya mengatakan karena pengaruh dari teman atau keluarga dan 7 orang atau 7% responden mengatakan memiliki calon walikota dan wakil walikota yang didukung.

Dari data yang muncul pada tabel 20 dapat kita lihat bahwa tingkat kepercayaan pemilih pemula cukup rendah terhadap calon yang akan menjadi walikota atau wakil walikota Makassar, ini menandakan rendahnya sentuhan calon walikotadan wakil walikota terhadap pemilih pemula, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pemilih pemula.

Tabel 21 masih terlihat pemilih pemula masih tetap dengan pendiriannya, pada tabel 23 hanya ada 8 responden yang terpengaruh oleh orang lain ketika ditanya kenapadia tidak setuju dengan golput, 8 responden menjawab karena terpengaruh oleh orang lain sehingga tidak setuju dengan golput, dan 7 responden lain mengatakan memiliki calon yang didukung.

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk berpolitik dan mempunyai keinginan untuk berbuat termasuk keinginan untuk menentukan pilihan dalam pilkada, ternyata pemilih pemula di Kota Makassar kebanyakan tidak mempercayai calon yang ada.Selain mempunyai keinginan untuk memilih manusia juga mempunyai keinginan agar orang lain mengikuti keinginanya, ini adalah sudah

kodrat seorang manusia. Berkenaan dengan hal tersebut dari data yang didapat dilapangan ternyata pemilih pemula juga tertarik untuk mempengaruhi pemilih lain untuk memilih salah seorang calon yang akan maju pada pilwali Kota Makassar.

Sebuah pilihan yang telah diputuskan oleh seseorang pemilih akan mengakibatkan sebuah konsekuensi yang mau tidak mau harus diterima karena pilihannya. Istilah Golongan Putih (*Golput*) sampai sekarang masih sering kita dengar dan menjadi *trand* dari pihak-pihak yang tidak memilih untuk tidak memberikan hak suaranya kepada salah seorang calon atau kandidat pada proses demokrasi.

Golput adalah orang yang tidak mempunyai pilihan, sepiantas memang terlihat seperti itu, namun apabila kita cermati dan teliti lagi maka golput bisa dikatakan sebagai sebuah pilihan dan itupun bisa dikatakan sebagai sebuah kekuatan politik, karena dengan adanya pihak yang tidak memberikan suaranya/tidak memilih salah satu dari calon yang ada maka akan berpengaruh kepada perolehan suara. Dari contoh diatas kita dapat melihat peranan dari kelompok yang golput atau yang tidak memilih salah satu calon. Makanya dapat dikatakan bahwa orang yang golput tidak bisa dikatakan sebagai orang yang tidak memilih karena pada dasarnya mereka sudah menentukan pilihannya dengan tidak memilih salah satu calon yang ada.

**Tabel 25** Sikap Pemilih Pemula yang Akan Menceritakan Keburukan Salah Satu Calon Kepada Orang Lain Jika Dia Mengetahuinya

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Iya	45	100%
2.	Tidak	55	55%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Tabel 25 menggali sikap pemilih pemula yang akan menceritakan keburukan salah satu calon kepada orang lain jika dia mengetahuinya. Dari 100 responden, 45 orang atau 45% responden yang mengatakan akan menceritakan keburukan salah seorang calon kepada orang lain jika dia mengetahui keburukan calon tersebut dan 55 orang atau 55% mengatakan tidak akan mengatakannya. Ini menandakan bahwa ada sebagian pemilih yang ingin terlibat/berpartisipasi langsung dalam mempengaruhi calon pemilih lain.

**Tabel 26** Partisipasi Pemilih Pemula Untuk Bersosialisasi Kepada Orang Lain

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah	44	100%
2.	Tidak Pernah	56	56%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

Terlepas dari persoalan diatas ternyata sebagian pemilih pemula juga turut berpartisipasi untuk mesosilisasikan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar secara langsung kepada orang lain, baik kepada keluarga maupun kepada teman-temannya. Dari 100 responden yang dimintai keterangannya ada 44 orang atau 44% responden yang pernah mensosialisasikan pemilihan walikota dan wakil walikota secara langsung kepada orang lain dan 56 orang atau 55% responden lainnya belum/tidak pernah melakukan sosialisasi kepada orang lain.

Data diatas kembali menguatkan pendapat bahwa pemilih pemula sangat ingin untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, walaupun data yang ditemukan menunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan data yang tidak ikut bersosialisasi namun setidaknya ini menandakan bahwa sebagian calon pemilih pemula juga ingin ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun 2013.

**Tabel 27** Bentuk Sosialisasi yang Pernah Dilakukan Oleh Pemilih Pemula

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Memberikan informasi yang saya ketahui	75	100%
2.	Mengajak untuk mengikuti sosialisasi	25	25%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penyebaran angket kepada responden*

*(Dari 100 responden hanya ada 39 responden yang pernah melakukan sosialisasi kepada orang lain)*

Terkait dengan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemilih kepada orang lain dari 100 responden, ada 39 orang atau 39% responden yang pernah mensosialisaikan pilwali Kota Makassar, 29 orang atau 29% responden mengatakan sosialisasi yang disampaikan berbentuk menyampikan informasi yang dia ketahui dan 10 orang atau 10% responden lainnya berusaha untuk mengajak dan menyarankan keluarga atau temannya untuk ikut mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kota Makassar.

Keinginan pemilih pemula untuk yang ingin ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pilwali Kota Makassar walaupun masih rendah jika dibandingkan dengan sikap pemilih pemula yang tidak atau belum pernah mensosialisasikan pilwali Kota Makassar kepada orang lain.

Secara keseluruhan kita bisa menilai bahwa pada dasarnya pemilih pemula punya keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013 namun dapat kita melihat bahwa keinginan pemilih pemula tersebut terhambat karena kurangdiperhatikannya pemilih pemula oleh KPU Kota Makassar khususnya kepada pemilih pemula pada pimilihan walikota dan wakil walikota Makassar sehingga berdampak pada kurang maksimalnya partisipasi politik di kalangan pemilih pemula.

***B. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.***

Generasi muda adalah penerus bangsa, ditangan merekalah sebenarnya suatu bangsa bisa mempertahankan kemerdekaannya dan mewujudkan cita-cita. Namun ironisnya, generasi muda saat ini justru menjadi kaum yang apolitis. Politik dianggap sebagai suatu kegiatan yang kotor dan penuh kebohongan. Tokoh-tokoh politik yang cenderung itu-itu saja menguatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk terjun ke dunia politik masih cenderung minim. Tingginya angka golput di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin mempertegas bahwa pemilih, khususnya pemilih pemula, kini semakin apatis terhadap politik.

Setidaknya ada empat faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih terkhusus pemilih pemula pemula. *Pertama*, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar. Sehingga mengakibatkan sebagian pemilih, tidak percaya bahwa pilkada maupun pemilu itu bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Pemilih juga tidak percaya bahwa parpol sekarang membawa kehidupannya menjadi lebih baik. Sehingga pemilih pemula tidak tertarik mengikuti pemilu.

*Kedua*, juga adanya kekecewaan pada wakil yang sudah duduk di pemerintahan maupun calon yang akan duduk di pemerintahan. Setidaknya ada pemikiran bahwa kandidat ataupun pasangan calon tidak bisa mengubah apa pun. Hal

ini muncul karena secara faktual yang diyakini pemilih, politisi saat ini dihinggapi penyakit suap.

*ketiga*, adalah teknis administrasi kepemiluan yang mau tidak mau juga membuat seseorang terpaksa golput, yakni tidak terdaftarnya yang bersangkutan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

*Keempat*, karena momentum pilkada ataupun pemilu yang ditetapkan sebagai hari libur, sehingga seseorang lebih memilih untuk berlibur ketimbang memilih.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan lingkungan politik, menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap kinerja pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan pro terhadap rakyat atau tidak. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang diantaranya adalah, pendidikan, jenis kelamin, profesi, dll.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pilwali Kota Makassar 2013, pada umumnya pemilih pemula masih belum memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan partisipasi politik, dan secara

tidak sadar ternyata mereka telah ikut berpartisipasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, terbukti dari data yang didapatkan di lapangan dengan adanya keinginan pemilih pemula agar orang lain atau temannya mengikuti pilihannya dalam pemilihan umum, ada pula pemilih pemula yang menyarankan temannya agar mengikuti sosialisasi mengenai pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar.

Pemilih pemula mengalami berbagai bentuk kendala politik dalam menentukan pilihan politiknya. Diantara persoalan yang dihadapi pemilih pemula adalah kebingungan politik dari situasi politik saat ini yang tidak pasti. Berbagai persoalan politik seperti korupsi, masalah hukum, membuat pemilih pemula cenderung apatis terhadap politik. Apatisme politik ini disebabkan oleh rusaknya citra lembaga-lembaga penyelenggara negara dan pergeseran orientasi partai politik.

Selanjutnya masalah yang harus dihadapi oleh pemilih pemula adalah minimnya pendidikan politik. Sebagai pemilih pemula tentu saja harus mendapatkan bimbingan, pembinaan, dan pengetahuan tentang politik. Pendidikan politik yang rendah akan berakibat pada rendahnya partisipasi dalam pemilu. Suara pemilih akan dengan mudah dibayar dengan uang dan sembako. Maka, hasilnya pun akan tertuju pada persoalan materi dan keuntungan belaka.

Rendahnya pendidikan politik pemilih pemula juga berakibat pada pergeseran makna dan fungsi politik yang sesungguhnya. Dalam diskusi dengan beberapa pelajar

yang memiliki hak pilih di Kota Makassar, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas pemilih pemula masih memaknai pemilu hanya sebatas pergantian presiden/gubernur/bupati/walikota yang tidak luput dari uang (*money politic*).

Oleh karena itu, berbagai pihak seperti media, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu (KPU Kota Makassar), dan lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggungjawab dalam memberikan pemahaman dan pembinaan politik kepada pemilih pemula. Berikut merupakan faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula;

#### A. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula.

1. Kesibukan kegiatan sehari-hari, kesibukan sebagai pelajar sangat banyak dan padat, sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan sehari-hari mereka ketimbang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan politik yang menyita waktu banyak.
2. Perasaan tidak mampu, perasaan minder ini biasa muncul karena merasa kurang berpengalaman dalam pemilu dan memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Misalnya, orang yang memiliki status ekonomi tinggi lebih berhak berpartisipasi dalam politik ketimbang orang yang memiliki status ekonomi rendah, jenis kelaminpun demikian mempengaruhi keaktifan seseorang, laki-

laki lebih aktif dari perempuan. Dengan adanya gejala seperti ini mereka lebih merasa aman jika berada di sektor privat.

3. Larangan dari pihak keluarga, pihak keluarga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Apabila ada larangan dari keluarga seseorang biasanya mengurungkan niatnya. Dalam hal ini harusnya keluarga mengarahkan untuk melakukan partisipasi bukan melarang.

#### B. Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula.

1. Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi saat menginjak usia remaja mengakibatkan ketertarikan untuk terlibat dan mengetahui sesuatu. Sama halnya dengan pemilih pemula yang ikut berpartisipasi politik mereka memiliki ketertarikan untuk mengetahui sehingga melibatkan diri untuk melakukan partisipasi politik.
2. Kesadaran politik pemilih pemula, pemilih pemula yang telah terdaftar dan memiliki dan menggunakan hak pilihnya memiliki kesadaran bahwa mereka juga turut menentukan nasib rakyat oleh karena itu mereka ikut berpartisipasi dalam hal ini memilih dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.

Dari hasil penelitian di lokasi penelitian, partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013, yaitu sebatas pemberian suara, kampanye dan berbicara masalah politik. Tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Makassar pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2013 tergolong rendah, dari 100 pelajar yang menjadi sampel hanya 39 orang atau 39% dari 100% sampel saja yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.

Keluarga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi cara pandang pemilih pemula mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk pendidikan politik yang diperoleh pertamakali dari ruang keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orang tua bisa membentuk perilaku pemilih mereka.

Pengaruh teman sebaya menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi mengikuti perilaku politik teman dekatnya.

Media massa terutama televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada masyarakat umum secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam kehidupan sehari-hari bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, (meskipun tidak selalu menonton program yang berkaitan dengan politik).

Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjustifikasi pilihan yang membedakan pemilih pemula dan kelompok pemilih lainnya adalah mengenai pengalaman politik dalam menghadapi pemilu yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan. Pemilih pemula cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

- a. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula yaitu; kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak orang tua.

- b. Faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula yaitu; rasa ingin tahu dan kesadaran politik pemilih pemula.

### ***B. Saran-Saran***

Adapun sarana partisipasi masyarakat yang perlu untuk dimaksimalkan. *Pertama*, hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu saja, meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis tahapan penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi penting dilakukan sebagai penanaman pemahaman bagi pemilih dalam pemilihan umum.

*Kedua*, pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses sosialisasi bagi pemilih pemula. Dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih pemula tentunya tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemulaharus dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman hakekat demokrasi sudah terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

*Ketiga*, survey, diskusi politik dan penghitungan cepat saat pemilihan umum sangatlah penting karena kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu,

kegiatan survey, diskusi politik dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

*Keempat*, tentu saja peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu atau KPU, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa *output* dari partisipasi tersebut. Bentuk netralitas, transparansi dan tanggung jawab sebagai kepribadian utama dari penyelenggara pemilu perlu dikedepankan dalam mengawal suksesnya setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jika sudah ditanamkan kepercayaan atas komitmen kejujuran dan ketidakberpihkan, maka masyarakat bisa antusias untuk ikut berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Grani, 2004.
- Adam Mubarak Badeng Muhammad. *Dampak Kampanye Terhadap Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Makassar Periode 2009-2014*, UNHAS Makassar, Sebuah Skripsi 2011.
- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Akbar M. *Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Darul Alqam Gombara Muhammadiyah Makassar (AN-16)*, UNHAS Makassar: sebuah Skripsi, 2012.
- Arifin Nurasmann. *Relasi Etnik Dalam Pemilukada Sulawesi Selatan Tahun 2013 Di Kota Makassar*, UNHAS Makassar, sebuah skripsi, 2012.
- Asty baalwy Noor. *Rekrutmen Partai Nasional Demokrat Dalam Proses Institusionalisasi Parta Di Kota Makassar*, UNHAS Makassar: Sebuah Skripsi, 2012.
- Bayu Pratama Anugrah. *Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009*, UNHAS Makassar: Sebuah Skripsi, 2012.
- Bakti, Andi Faisal dkk. *Literasi Politik dan Konsolidai Demokrasi*, Jakarta, Churia Press, 2012.
- Bappeda – BPS. *Makassar dalam Angka 2012*.
- Brannen Julia; alih bahasa H. Nuktah Afrawie Kurde Imam Safe'I, dan Noorhaidi A. H. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Cet VI*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2005.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2012.
- Data Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2012.
- Data hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Makassar tahun 2013.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

- Idris Muh. Irfan, dan Sastrawati Nila. *Sosiologi Politik*, Makassar, Alauddin Press, 2010.
- KPU Kota Makassar. *Pemilukada Makassar 2008 Sebuah Testemoni Demokrasi*, Makassar, PT. Fajar Makassar Grafika, 2008.
- Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Pito Toni Andrianus, Efriza, dan Fasyah Kemal. *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung, Nuansa 2006.
- Profil Kota Makassar Tahun 2012.
- Profil SMA N 1 Makassar Tahun 2012.
- Profil SMK N 8 Makassar Tahun 2012.
- Profil MAN 2 Model Makassar Tahun 2012.
- Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (KPU Kota Makassar).
- Raga, Maram Rafael. *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.
- Rush Michael dan Althoff Phillip; alih bahasa Kartono Kartini. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta Rajawali Pers, 2008.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Sudjana. *Pengantar Statistika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, CV, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, CV, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung. Alfabeta, 2000.

## LAMPIRAN

### DOKUMEN WAWANCARA

**Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kota Makassar Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013 (studi pada pelajar di tingkat sekolah menengah atas di kota makassar).**

#### Identitas Responden.

Nama :  
Asal Sekolah :  
TTL :  
Alamat :  
Jenis Kelamin :  
Suku :  
Agama :

- 
1. Apakah dengan adanya sosialisasi mengenai pemilu dari pihak KPU Kota Makassar dapat berperan dalam meningkatkan minat anda sebagai pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum?

Jawaban:

2. Apakah dengan adanya pihak KPU Kota Makassar yang melakukan sosialisasi tersebut ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi menarik bagi anda sebagai pemilih pemula?

Jawaban:

3. Apakah dengan tidak adanya sosialisasi dari pihak KPU Kota Makassar anda akan berpartisipasi dalam pemilihan umum atau tidak ikut berpartisipasi?

Jawaban:

4. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut pesan yang akan disampaikan oleh pihak KPU Kota Makassar dapat ditangkap oleh pemilih pemula?

Jawaban:



## KUISIONER

**Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kota Makassar Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013 (studi pada pelajar di tingkat sekolah menengah atas di kota makassar).**

### Identitas Responden.

**Nama :**

**Asal Sekolah :**

**TTL :**

**Alamat :**

**Jenis Kelamin :**

**Suku :**

**Agama :**

1. Pengetahuan pemilih pemula tentang pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung.

Apakah anda tahu tentang pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung?

Jawaban :     A. Tahu  
                  B. Tidak

2. Jika sekiranya anda mengetahui tentang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, darimana anda mengetahuinya?

Jawaban:     A. Orang tua  
                  B. Media  
                  C. Teman  
                  D. Lain-lain:.....

3. Pengetahuan pemilih pemula tentang penggunaan hak suara dalam pilkada.

Apakah anda sudah tahu kalau anda sudah boleh menggunakan hak suara?

Jawaban :     A. Tahu  
                  B. Tidak

4. Pengetahuan pemilih pemula apakah pemilih pemula tersebut mengetahui bahwa dia terdaftar dalam pemilu.

Apakah anda mengetahui bahwa anda terdaftar sebagai pemilih pada pilwali Kota Makassar tahun 2013?

Jawaban:     A. Ya  
                  B. Tidak

5. Usaha calon Pemilih Pemula Kota Makassar jika mengetahui bahwa dia belum terdaftar dalam daftar calon pemilih sementara.

Apa yang akan anda lakukan jika anda mengetahui bahwa anda belum terdata dalam daftar calon pemilih sementara?

Jawaban :     A. Menemui ketua RT/RW  
                  B. Tidak melakukan apa-apa

6. Sosialisasi KPU kepada calon pemilih pemula di Kota Makassar.

Apakah anda sudah pernah mengikuti acara sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013?

Jawaban:     A. Pernah  
                  B. Belum pernah

7. Harapan calon pemilih pemula untuk dapat mengikuti sosialisasi dari KPU

Apakah anda berharap untuk dapat mengikuti sosialisasi dari KPU Kota Makassar?

Jawaban:     A. Berharap  
                  B. Tidak berharap

8. Pengetahuan calon pemilih pemula di Kota Makassar tentang siapa saja calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013.

Apakah anda tahu siapa-siapa saja calon Walikota dan Wakil Walikota?

Jawaban:     A. Tahu  
                  B. Tidak

9. Apakah anda mengikuti kampanye salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar?

Jawaban:     A. Ya  
                  B. Tidak

10. Mengapa anda mengikuti kampanye salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota?

Jawaban:     A. Pengaruh Keluarga  
                  B. Pengaruh Teman  
                  C. Keinginan Sendiri

11. Mengapa anda tidak mengikuti kampanye salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar?

Jawaban:     A. Pengaruh Keluarga  
                  B. Pengaruh Teman  
                  C. Keinginan Sendiri

12. Penilaian calon pemilih pemula terhadap Walikota dan Wakil Walikota yang sedang menjabat saat mecalonkan kembali.

Jika Walikota dan Wakil Walikota yang sekarang sedang menjabat dan mencalonkan lagi apakah anda akan memilih dia?

Jawaban:     A. Iyah  
                  B. Tidak  
                  C. Tidak tahu

13. Sikap calon pemilih pemula terhadap calon yang sudah dia kenal.

Jika anda mengenal calon yang akan maju pada Pilwali nanti apakah anda akan memilih salah satu dari calon yang anda kenal?

- Jawaban:       A. Iyah  
                  B. Tidak  
                  C. Tidak tahu

14. Alasan calon pemilih pemula memilih salah seorang calon yang sudah dia kenal pada pilwali kota Makassar.

Apa alasan anda memilih salah satu calon walikota yang anda kenal?

- Jawaban:       A. Menyukai salah satu calon tersebut  
                  B. Pengaruh keluarga/teman  
                  C. Keinginan sendiri

15. Alasan calon pemilih pemula untuk tidak memilih salah seorang calon yang sudah dia kenal pada pilwali kota makassar.

Apa alasan anda tidak memilih calon walikota yang anda kenal?

- Jawaban:       A. Menyukai calon lain  
                  B. Pengaruh keluarga/teman  
                  C. Keinginan sendiri

16. Pandangan calon pemilih pemula terhadap Golput.

Apakah anda setuju dengan golput?

- Jawaban:       A. Setuju  
                  B. Tidak setuju

17. Alasan calon pemilih pemula kenapa dia setuju dengan Golput.

Alasan anda mengapa anda setuju?

- Jawaban:       A. Tidak mempercayai calon yang ada  
                  B. Pengaruh keluarga/teman

18. Alasan calon pemilih pemula kenapa dia tidak setuju dengan Golput.

Alasan anda mengapa anda tidak setuju?

- Jawaban:       A. Tidak mempercayai calon yang ada  
                  B. Pengaruh keluarga/teman

19. Sikap pemilih pemula yang akan menceritakan keburukan salah satu calon kepada orang lain jika dia mengetahuinya.

Apakah anda menceritakan keburukan salah satu calon kepada orang lain lain jika anda mengetahuinya?

- Jawaban:       A. Iyah  
                  B. Tidak

20. Partisipasi calon pemilih pemula untuk bersosialisasi kepada orang lain.

Apakah anda pernah mensosialisasikan Pilkada Kota Makassar kepada orang lain?

Jawaban:       A. Pernah  
                  B. Tidak

21. Bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemilih pemula.

Dalam bentuk apa sosialisasi yang anda berikan kepada orang lain?

Jawaban:       A. Memberikan informasi yang saya ketahui  
                  B. Mengajak untuk mengikuti sosialisasi

